View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by Digital Library of UIN Sunan Ampel

PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN GRESIK

(Studi Kasus Musyawarah Rencana Pembangunan Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2019)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik

Oleh:

SAFIRA HERAWATI

NIM. I7216076

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

MARET 2020

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bissmillahirahmanirahim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Safira Herawati

NIM : I71216076

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : **PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN GRESIK (Studi Kasus Musyawarah Rencana Pembangunan Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2019)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik manapun.
2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 11 Maret 2020

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

1D2E3AHF494057678

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Safira Herawati

NIM. I71216076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Safira Herawati

NIM : I71216076

Program Studi : Ilmu Politik

yang berjudul: **"PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PEREMPUAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 (Studi Perempuan Dan Pembangunan)"**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 11 Maret 2020

Pembimbing,

Dr. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP. 19690907199402001

PENGESAHAN

Skripsi oleh Safira Herawati judul: **"PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN GRESIK (Studi Kasus Musyawarah Rencana Pembangunan Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2019)"** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 19 Maret 2020.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Dr. Aniek Nuarhayati, M.Si
NIP. 196909071994020 01

Penguji II

Holilah, S.Ag, M.Si
NIP. 197610182008012008

Penguji III

Dr.Abd.Chalik, M.Ag
NIP. 197306272000031 2002

Penguji IV

Muchammad Ismail, MA
NIP. 198005032009121003

Surabaya, 26 Maret 2020

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil., Ph.D.
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **SAFIRA HERAWATI**
NIM : **171216076**
Fakultas/Jurusan : **FISIP / ILMU POLITIK**
E-mail address : **herawatisafira12@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN GRESIK (STUDI KASUS MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PEREMPUAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juli 2020

Penulis

(Safira Herawati)

ABSTRAK

Safira Herawati, 2020, *Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Gresik (Studi Kasus Musyawarah Rencana Pembangunan Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2019),* Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : *Gender, Musrenbang Perempuan, Pembangunan, PUG*

Isu mengenai gender masih menjadi topik hangat dalam diskursus pembangunan. Perhatian khusus diberikan kepada perempuan yang selama proses pembangunan belum mencapai minimun kehadiran. Sehingga pendistribusian kemaslahatan atas pembangunan masih mengalami kesenjangan, khususnya di Kabupaten Gresik. Salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam mengupayakan pengentasan ketimpangan gender terkait pembangunan telah diakomodir melalui inisiasi forum khusus yang disebut dengan Musrenbang Perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dua pokok permasalahan, yaitu: a) Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gresik sebagai gambaran latar belakang dilakukannya inisiasi Musrenbang Perempuan dan, b) Kontribusi Musrenbang Perempuan tersebut sebagai refleksi dari upaya Pemerintah Daerah dalam mengakomodir pembangunan bagi perempuan. Masalah pertama akan dianalisis melalui konsep PUG dengan 7 Prasayarat Pelembagaannya dari KemenPPPA. Masalah kedua akan dianlisis melalui teori WAD (*Women And Development*) dengan indikator GAP (*Gender Analysis Pathway*) sebagai tolak ukur tambahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pemaparan hasil penelitian berupa narasi yang diperoleh dari penghimpunan data melalui wawancara terstruktur, observasi, LGD (*Leaderless Group Disscussion*) dan *literature research*. Proses mendapatkan informasi diperoleh melalui teknik *purposive sampling* yang kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan metode reduksi dan triangulasi.

Hasil yang didapatkan adalah: a) PUG di Kabupaten Gresik belum maksimal, terlihat dari angka IPG dan IDG serta hanya memenuhi 4 dari 7 prasyarat pelembagaan PUG. b) Upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi kesenjangan pembangunan tersebut telah dibuktikan melalui inisiasi Musrenbang Perempuan yang mampu mengakomodir usulan perempuan terhadap pembangunan sesuai dengan yang dikonsepkan oleh WAD dan GAP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Safira Herawati, 2020*, Gender Mainstreaming in the Gresik Regency (Case Study Deliberation on Women's Development Plans In The Gresik Regency 2019)*, Thesis of Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.

Keyword: *Gender, Women's Musrenbang, Development, PUG*

The issue of gender is still a hot topic in the development discourse. Special attention is given to women who during the development process have not yet reached the minimum attendance. So that the distribution of benefits over development still experiences gaps, especially in Gresik Regency. One of the commitments of the Gresik Regency Government in seeking to alleviate gender inequality related to development has been accommodated through the initiation of a special forum called the Women's Musrenbang.

This study aims to describe two main issues, namely: a) Gender Mainstreaming in Gresik Regency as a background description of the Women's Musrenbang initiative and, b) The contribution of the Women's Musrenbang as a reflection of the local government in accommodating development for women. The first problem will be analyzed through the concept of PUG with 7 Institutional Prerequisites from KemenPPPA. The second problem will be analyzed through WAD (Women and Development) theory with the GAP (Gender Analysis Pathway) indicator as an additional benchmark. This type of research is qualitative. Presentation of research results in the form of narratives obtained from data collection through structured interviews, observations, LGD (Leaderless Group Discussion) and literature research. The process of obtaining information is obtained through purposive sampling technique which is then processed using data reduction and triangulation methods.

The results obtained are: a) PUG in Gresik Regency has not been maximized, seen from the IPG and IDG figures and only meets 4 of the 7 prerequisites of institutionalization of PUG. b) The efforts of the Regional Government in overcoming the development gap have been proven through the initiation of the Women's Musrenbang which is able to accommodate women's proposals for development in accordance with the concept of WAD and GAP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
PERNYATAAN PUBLIKASI iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI viii
ABSTRAK ix
ABSTRACK x
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR TABEL xvi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
E. Definisi Konseptual 13
F. Penelitian Terdahulu 16

BAB II KAJIAN TEORITIK
A. Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) 21
B. WAD (Women And Development) 25
C. Kerangka Analisis 29

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 30
B. Subyek dan Lokasi Penelitian 31
C. Teknik Pengumpulan Data 35
D. Teknik Analisis Data 36
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 38
F. Tahap-Tahap Penelitian 39
G. Sistematika Pembahasan 41
H. Jadwal Penelitian 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN GRESIK (Studi Kasus Musyawarah Rencana Pembangunan Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2019)
A. Setting Lokasi Penelitian 44
B. Potret Organisasi
a. Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah).....49
b. Dinas KBP3A (Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 52
c. LSM KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan) 55
C. Data dan Analisis Penelitian
a. Komitmen Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.....61
b. Kontribusi Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2019 Dalam Mengakomodir Pembangunan Bagi Perempuan.....86

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 112
B. Saran 113

DAFTAR PUSTAKA..... xvii

LAMPIRAN..... xxii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Musyawarah Rencana Pembangunan 9

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 29

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bappeda.....51

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas KB3A.....54

Gambar 4.4 Struktur Kelompok Kerja PUG dan FPG 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Berbasis Gender Nasional Tahun 2017 4

Tabel 1.2 Matriks Hasil Penelitian Terdahulu 16

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 43

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 46

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut.....46

Tabel 4.3 Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Bappeda 49

Tabel 4.4 Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Dinas KPB3A 52

Tabel 4.5 Struktur KPS2K Jawa Timur 59

Tabel 4.6 Pembangunan Berbasis Gender Tahun 2017-2018.....69

Tabel 4.7 Laporan Dinas Keshatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2018 69

Tabel 4.8 Keterlibatan Perempuan Dalam Posisi Strategis dan DPRD 70

Tabel 4.9 RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2015-2021 72

Tabel 4.10 Prestasi Kabupaten Gresik Terkait Perempuan.....75

Tabel 4.11 Pembangunan Berbasis Gender Tahun 2017-2018.....77

Tabel 4.12 Kelembagaan PUG Kabupaten Gresik.....84

Tabel 4.13 Daftar Hadir Peserta Musrenbang Perempuan 2019.....95

Tabel 4.14 Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2019 97

Tabel 4.15 Daftar Hadir Musrenbang Tahun 2017 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pentingnya partisipasi perempuan di ranah publik khususnya dalam proses pembangunan telah diterapkan oleh negara sejak tahun 1995, bersamaan dengan keikutsertaan negara dalam Konferensi Perempuan Se-dunia keempat di Beijing. Pertemuan tersebut membahas mengenai ratifikasi peletakan kesetaraan gender dalam proses pembangunan manusia di setiap negara. Dukungan ratifikasi tersebut di desak lagi melalui dokumen yang berisi tentang penghapusan tindak kekerasan dan pembedaan atas perempuan atau dikenal dengan nama *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).[2] Lalu, mulai tahun 2000 Pemerintah mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) nomor 9 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan aspek yang harus dilaksankan disamping pencapaian aspek *Suistainable Development* (Pembangunan yang Berkelanjutan) dan *Good Governance* (Manajemen Pemerintahan yang baik).

Kemudian, beberapa regulasi tersebut diteguhkan lagi tahun 2004 melalui UU nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

[2] Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaanya di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011) hlm 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2013 diundangkan Surat Edaran Bersama Menkeu (Menteri Keuangan), MenPPN, Mendagri (Menteri Dalam Negeri), Meneg PP & PA (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) terkait Strategi Nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Untuk tingkat Kabupaten/Kota, pelaksanaan PUG di amanatkan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah. Pelaksanaan PUG di wilayah regional juga mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *jo* Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.[3] Kebijakan tersebut selaras dengan kesetaraan gender yang dilakukan di daerah Gresik melalui Perda nomor 4 tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender.[4]

Berbagai produk legislasi tersebut merupakan hasil refleksi Pemerintah terhadap kebutuhan perempuan yang semakin kompleks. Perencanaan pembangunan yang responsif gender sangat diperlukan agar terciptanya keterlibatan perempuan dan laki-laki yang sama tanpa terjadi

---

[3] https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl988/istilah/ : acces 22/02/2020 122.45 WIB - Istilah Jo artinya *juncto* atau bertalian dengan, berhubungan dengan...

[4] Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan Nasional
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Surat Edaran Tahun 2013 tentang Startegi Nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tumpang tindih, sehingga saluran dan kemaslahatan pembangunan mampu menghadirkan kondisi yang seimbang dan dapat dinikmati oleh kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, masih banyak persoalan yang masih dihadapi oleh perempuan dalam hal pembangunan, khususnya di Kabupaten Gresik.[5] Selama ini, orientasi pembangunan telah memasung kelompok perempuan. Misalnya melalui program KB (Keluarga Bencana) yang lebih mengintimidasi perempuan telah mengakibatkan hak atas kontrol tubuh dan sistem produksinya berhasil direnggut. Seperti yang ditulis oleh Maria Mies bahwa perempuan dianggap sebagai *the last colony* atau koloni yang dijajah sesudah kawasan lainnya telah merdeka paska Perang Dunia II.[6] Selain itu, kesenjangan perempuan dalam bidang pembangunan juga dapat dilihat dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia), IPG (Indeks Pemberdayaan Gender) dan IDG (*Index Development Gender*) di suatu daerah. Berdasarkan data Pembangunan Manusia Berbasis Gender tahun 2017 di Kabupaten Gresik[7] dapat dilihat sebagai berikut :

---

[5] Salah satu permasalahan perempuan di bidang pembangunan adalah partisipasinya di ranah publik masih terhitung minim (Muhammad Fahmi, *Defeminisasi Kemiskinan Berbasis Komunitas di Mondoluku Wringinanom Gresik*, Proceedings Of The International Conference On University-Community Engagement Surabaya-Indonesia, 2-5 August 2016) hlm 67 -
Hal tersebut berkaitan dengan pandangan sebagian besar masyarakat khususnya di pedesaan yang masih memandang perempuan tidak dapat dipisahkan dari tugas domestiknya (Muhammad Nur Taufi dan Refti Handini Listyani, *Pembangunan Berbasis Gender Mainstraming : Studi Analisis Gender Implementasi Program Gender Watch di Gresik*, Paradigma : Vol. 5 No. 3 Tahun 2017) hlm 2

[6] Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen, and Caludia von Werlhof, 1998, *Women : The Last Colony*, London : Zed Books dalam Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaanya di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011) hlm xx

[7] Kerjasama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1

Indeks Pembangunan Berbasis Gender Nasional Tahun 2017

Daerah	IPM	IPG	IDG
	(%)		
	2017		
Kabupaten Gresik	74,84	89,57	63,35

IPG	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-Rata Lama Sekolah		Pengeluaran Per-Kapita Disesuaikan	
	(%)							
	2017							
	P	L	P	L	P	L	P	L
	70,38	74,22	13,93	13,70	9,49	8,44	18.825	9.905

IDG	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Posisi Strategis Perempuan	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja
	(%)		
	2017		
	12,00	48,40	31,42

Sumber : Pembangunan Berbasis Gender Nasional Tahun 2018

Dari data diatas dapat dilihat bahwa hampir di seluruh indikator pembangunan, perempuan masih berada di bawah angka laki-laki. IPM memiliki indikator pengukuran yang sama dengan IPG yakni kesempatan hidup atau kesehatan, peluang dan rata-rata lama sekolah atau pendidikan, serta pengeluaran per-individu atau ekonomi. IPG merupakan lanjutan dari IPM. IPM memandang capaian pembangunan atas laki-laki serta perempuan, sedangkan IPG memandang ketimpangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. IPG dengan nilai 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menandakan tidak ada kesenjangan, sedangkan IPG dibawah 100 menandakan kesenjangan yang dialami oleh perempuan. Begitu sebaliknya, IPG diatas 100 berarti kesenjangan dialami oleh laki-laki. Kecilnya selisih angka IPG dengan kurs 100 artinya semakin sejajar pembangunan yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan. IDG melihat sejauh mana keaktifan perempuan dalam bidang politik (keterlibatan perempuan di parlemen), pengambilan keputusan (posisi strategis seperti eselon) dan ekonomi (sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja).[8] IDG menjadi satu dari sekian indikator yang dinilai sebagai ruang bagi perempuan untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Angka IPG di Kabupaten Gresik masih menunjukkan adanya kesenjangan yang dialami oleh perempuan. Secara jasmani, perempuan memiliki pasokan kondisi genetik yang memiliki implikasi harapan hidup lebih lama dibandingkan dengan laki-laki.[9] Namun, potensi hidup lebih panjang tidak akan berjalan optimal apabila indikator dari pendidikan masih rendah, disusul dengan ruang perekonomian yang masih didominasi oleh laki-laki. Jika pencapaian pembangunan dilihat dari beberapa indikator IPG, hal ini berbanding lurus dengan angka IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) yang juga menunjukkan rendahnya keaktifan perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Padahal sejatinya, indikator IDG dapat menjadi ruang untuk perempuan dalam melibatkan diri di setiap alur penyusunan kebijakan publik dengan tujuan memperkecil peluang

[8] Iva Khasanah Ketua KPS2K, hasil wawancara pada 23 Januari 2020
[9] Kerjasama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018*, hlm 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terciptanya regulasi-regulasi yang bias gender. Namun, selisih antara IPG dan IDG belum dikatakan mencapai posisi ideal dimana angka IPG sama besarnya dengan IDG. Artinya, pembangunan gender yang tinggi seharusnya diikuti dengan pemberdayaan gender yang tinggi pula.[10]

Isu mengenai gender memang masih menjadi topik hangat dalam diskursus pembangunan. Gender berkitan erat dengan peletakan sifat atas laki-laki dan perempuan yang dibentuk berdasarkan kondisi sosial dan kultural.[11] Sifat yang melekat ini biasa disebut dengan pelabelan atau *stereotipe*. Pelabelan atau penandaan negatif terhadap perempuan yang dianggap lemah, sensitif dan rawan menjadi korban pelecehan telah berhasil membuat hak perempuan dikurung di dalam urusan rumah saja. Laki-laki dinilai dapat memainkan peran secara rasional ketimbang perempuan yang secara emosional hanya cocok dalam menjalankan peran di ranah domestik.[12] Sehingga, menomerduakan perempuan setelah laki-laki berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan itu sendiri. Padahal partisipasinya memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam mewakili suara perempuan miskin dan marjinal akibat konstruksi sosial di masyarakat.[13] Namun sekali lagi, konstruksi sosial yang telah dibangun sekian lama mengakibatkan kaum perempuan menganggap wajar atas terkurungnya potensi dan hak sebagai

---

[10] Ibid,. hlm

[11] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999) hlm 8

[12] Laily Muthmainnah, *Kritik Feminis Terhadap Developmentalisme*, (Jurnal Filsafat : Vol. 18 No. 3 Desember 2008) hlm 320

[13] https://kps2k.org/lain-lain/musyawarah-rencana-pembangunan-perempuan-musrenbang-perempuan-di-kabupaten-gresik/ (acces : 05/10/2019 18.15 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga negara yang sama dalam setiap lini proses politik.[14] Sehingga, diperlukan usaha ekstra dalam membangkitkan kesadaran perempuan dalam menuangkan kontribusinya, khususnya dalam setiap proses pembangunan di Kabupaten Gresik yang salah satunya dapat dilakukan melalui penggiatan program *Gender Mainstreaming* (Pengarusutamaan Gender).

Pelaksanaan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) di sebuah daerah memerlukan koordinasi secara struktural dan fungsional dari setiap *stakeholder* bersama dengan pemangku kebijakan dalam mengupayakan terciptanya keadilan dan kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan perempuan secara praktis namun juga kebutuhan perempuan secara strategis sebagai penyebab rendahnya akses kaum perempuan terhadap pembangunan. Perempuan seringkali hanya menerima hasil pembangunan tanpa melibatkan diri dalam proses perencanaan. Hal tersebut menggambarkan implikasi dari konstruksi sosial yang memposisikan seorang perempuan kurang dipercaya untuk mengambil dan mengikuti proses pembuatan keputusan. Sampai pada tingkat di internal OPD (Organisasi Pemerintah Daerah), pemahaman tentang seks dan gender juga masih dalam kategori rendah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan perempuan, menjadi tanggung jawab penuh anggota maupun

[14] Cahyani Widi Larasakti, *Skripsi : Musrenbang Perempuan Sebagai Arena Perjuangan Kesetaraan Perempuan di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2017) hlm 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

OPD yang "berjenis kelamin" perempuan.[15] Padahal pemahaman tentang perempuan juga memerlukan kehadiran laki-laki sebagai bentuk pengintegrasian pemahaman yang memiliki relasi dengan kesetaraan dan keadilan gender terutama dalam lingkup pembangunan daerah.

Proses pembuatan keputusan khususnya dalam hal pembangunan di Kabupaten Gresik dapat dilihat dari kegiatan Musrenbang atau Musyawarah Rencana Pembangunan yang bertujuan untuk mengarahkan agenda Pemerintah Daerah selama satu tahun kedepan. Musrenbang dihadiri oleh *stakeholder* atau pemangku kepentingan bersama dengan jajaran Pemerintah Daerah untuk mengakomodir, lalu merumuskan kesepakatan sesuai dengan yang telah disampaikan oleh peserta musrenbang.[16] Pada dasarnya, Musrenbang membuka akses bagi masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. Namun, seringkali proses Musrenbang begitu maskulin atau didominasi oleh kehadiran dan kepentingan laki-laki [17] sebagai perwakilan di setiap daerah yang lebih kecil (desa). Hal yang seperti itu akhirnya akan berdampak pada implementasi hasil Musrenbang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) yang hanya dapat dirasakan oleh laki-laki sebagai kaum superior dalam masyarakat. Daripada itu, kepentingan kaum perempuan belum terjamah sebagai program komprehensif pembangunan

[15] Dalam hal ini, jenis kelamin dapat dikaitkan dengan anggota OPD perempuan untuk menghadiri maupun menggali usulan atau sosialisasi tentang gender atau perempuan. Bisa juga dikaitkan dengan Dinas yang berkaitan langsung dengan perempuan seperti KBP3A (Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

[16] Muhammad Idris Patarai, *Kinerja Keuangan Daerah*

[17] Cahyani Widi Larasakti, *Skripsi : Musrenbang Perempuan Sebagai Arena Perjuangan Kesetaraan Perempuan di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2017) hlm 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah karena minimnya kehadiran perempuan dalam menyuarakan kebutuhannya.[18] Sehingga diperlukan pemberdayaan perempuan untuk membangkitkan kesadaran dan potensi yang ada di dalam dirinya, khususnya dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui partisipasi aktif di arena publik. Secara umum, tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1.1

Alur Musyawarah Rencana Pembangunan

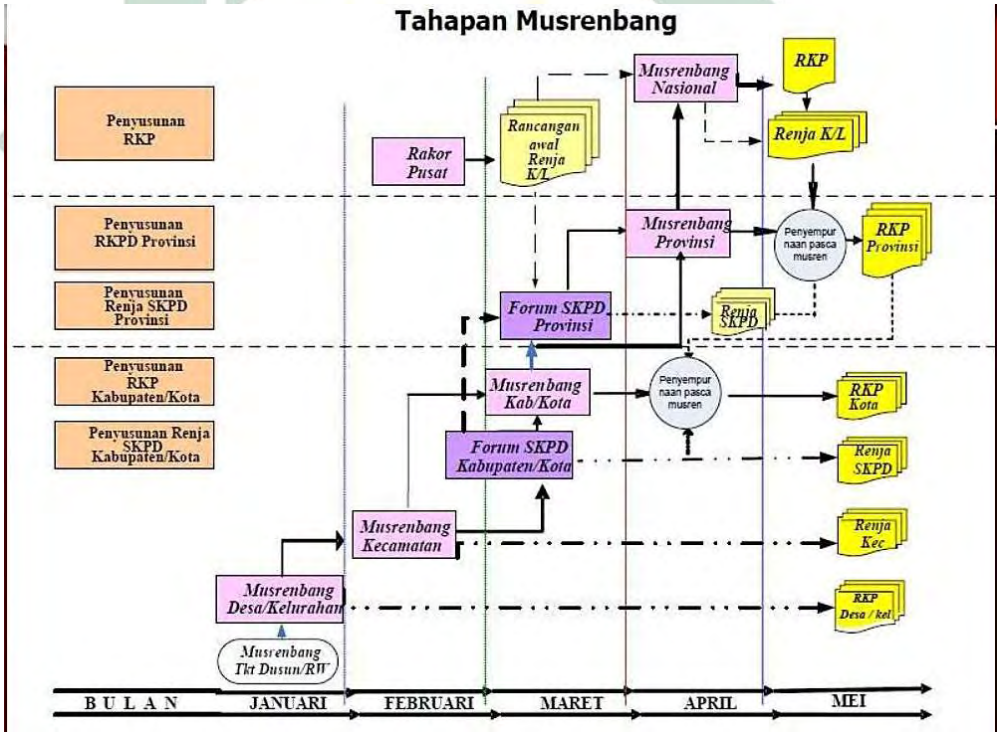

Sumber : https://www.slideshare.net/reinsjr/presentasi-musrenbang

[18] Ibid,. hlm 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya dalam mengkritisi persoalan perempuan di Kabupaten Gresik datang dari salah satu NGO (*Non-Government Organization*) yang menjalankan perannya sebagai *controlling* jalannya Pemerintahan. Salah satu NGO pemerhati berbagai permasalahan perempuan di Gresik adalah KPS2K (Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan) yang berdiri sejak 22 Desember 2004. KPS2K merupakan komponen dari aksi sosial yang menjunjung tinggi harkat demokrasi, kesetaraan gender, kontra terhadap kekerasan dan tindakan diskriminatif, *personal is political*, keberagaman dan berkompeten di bidangnya. Bagian dari kerangka pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh KPS2K adalah dengan mendirikan sekolah perempuan dengan maksud tercapainya kepentingan gender praktis dan strategis [19] yang bermuara pada peran perempuan sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek dalam proses politik. Tahun 2013, KPSK mampu menginisiasi Sekolah Perempuan di Kecamatan Wringinanom sebagai pijakan awal untuk menyadarkan potensi perempuan di ranah publik, yang kemudian menjadi keberlanjutan program dalam menginisiasi Musrenbang Perempuan agar upaya dalam meningkatkan kesadaran perempuan yang tertinggal atau terabaikan suaranya dapat dimunculkan ke permukaan.

Musrenbang perempuan Kabupaten Gresik dilakukan pertama kali pada tahun 2018 di bulan Maret. Pada waktu itu, suara perempuan direpresentasikan oleh perwakilan empat sekolah perempuan yang

[19] Windi Budi Lestari, *Pemenuhan Kepentingan Gender Melalui Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon, Wringinanom, Kabupaten Gresik*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usulannya berhasil masuk dalam RKPD Kabupaten Gresik tahun 2019. Selanjutnya, di tahun 2019 Musrenbang Perempuan dihadiri lebih banyak peserta yang terfokus pada empat kluster pembahasan antara lain kepemimpinan dan keikutsertaan perempuan di ranah publik, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Pelaksanaan Musrenbang Perempuan tidak untuk menandingi musrenbang reguler atau konvensional. Bahkan, musrenbang perempuan bertujuan untuk menaikkan taraf musrenbang konvensional melalui usulan yang khas dari perempuan yang sampai saat ini mengalami keterbatasan kesempatan oleh peserta musrenbang konvensional yang di dominasi oleh laki-laki.[20]

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dua pokok permasalahan, yaitu: a) Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gresik sebagai gambaran latar belakang dilakukannya inisiasi Musrenbang Perempuan dan, b) Kontribusi Musrenbang Perempuan tersebut sebagai refleksi dari upaya Pemerintah Daerah dalam mengakomodir pembangunan bagi perempuan yang selama ini masih mengalami kesenjangan cukup tinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam riset studi ini antara lain :

[20] https://kps2k.org/lain-lain/musyawarah-rencana-pembangunan-perempuan-musrenbang-perempuan-di-kabupaten-gresik/ (acces : 05/10/2019 18.15 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pengarusutamaan gender di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana kontribusi Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik tahun 2019 dalam mengakomodir pembangunan bagi perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengarusutamaan gender di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang kemudian menjadi gambaran latar belakang dalam dilakukannya inisiasi musrenbang perempuan.
2. Untuk memaparkan kontribusi Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik tahun 2019 dalam mengakomodir pembangunan bagi perempuan yang selama ini masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis, untuk memberikan *counter* wacana dan pemahaman terkait pentingnya keterlibatan perempuan di ranah publik yang masih minim. Ditengah massifnya problematika maskulinitas ataupun kepentingan politik yang menjadikan perempuan terpinggirkan suara dan haknya hanya untuk mencapai kekuasaan saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat Praktis, untuk melusruskan *claim* atau konstruksi sosial yang mereduksi perempuan hanya sebagai manusia dengan segala pusat kelemahan. Dengan adanya musrenbang perempuan, diharapkan mampu mengelaborasi nilai-nilai pengarusutamaan gender. Terlebih dalam permasalahan publik yang sangat memerlukan aspirasi perempuan sebagai kelompok rentan atau akar rumput (*grassroot*).
3. Manfaat Akademis, untuk memberikan tawaran paradigma integrasi politik melalui kacamata keadilan gender yang dirasa masih rendah. Disisi lain, penelitian ini juga dapat digunakan menjadi sumber literatur ataupun referensi di UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya dalam diskursus politik.

E. Definisi Konseptual

Agar pembahasan konsep terkait masalah penelitian ini tidak melebar maka, definisi konseptual memiliki fungsi dalam mempertegas konsep dan pembatasan fokus permasalahan penelitian. Definisi konseptual yang akan dijelaskan berdasarkan judul penelitian meliputi pengarusutamaan gender atau PUG (*gender mainstreaming*), Musrenbang Perempuan (Musyawarah Rencana Pembangunan Perempuan) serta Studi Perempuan dan Pembangunan.

1. PUG (Pengarusutamaan Gender atau *Gender Mainstreaming*)

   Pengarusutamaan gender atau biasa dikenal *gender mainstreaming* dapat dipahami sebagai sebuah konsep dan strategi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PUG sebagai konsep dipahami sebagai ruang *political will* dan *politic discourse* dalam setiap program dan kebijakan Pemerintah yang mengintegrasikan perspektif gender untuk memperkecil persoalan ketidakadilan gender. Sedangkan PUG sebagai strategi merupakan upaya untuk menciptakan sasaran program pembangunan yang sensitif atau responsif gender baik melalui kampanye, sosialisasi, advokasi dan *training* secara terus menerus terkait penyebaran isu-isu tentang kesetaraan gender misalnya melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, data statistik dan keterlibatan perempuan di ranah publik.[21]

PUG diharapkan menjadi alternatif dalam membentuk suatu kepekaan terhadap responsifitas gender di dalam program pembangunan. Sehingga, teciptalah proses penegakkan hak dan kewajiban kelompok perempuan untuk memperoleh kesamaan peluang, penghormatan dan operasionalitas yang sama di ranah publik.[22]

2. Musrenbang Perempuan (Musyawarah Rencana Pembangunan Perempuan)

Musrenbang perempuan berangkat dari rendahnya partisipasi dan kualitas perempuan yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakmampuan dalam memicu berbagai program pembangunan

[21] Dian Maharso Yuwono, *Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Pertanian : Kasus Pada Pelaksanaan Program FEATI Di Kabupaten Magelang*, SEPA : Vol. 10 No.1 September 2013 : 140 – 147

[22] Waston Malau, *Pengarusutamaan Gender Dalam Program Pembangunan*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 6 (2) : 125-131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih terbuka atas pertimbangan gender.[23] Musyawarah rencana pembangunan perempuan merupakan sebuah forum bagi perempuan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan menampung aspirasi kaum perempuan dalam memutuskan sebuah perencanaan pembangunan satu tahun kedepan. Sehingga partisipasi perempuan tidak hanya berhenti pada penerima keputusan pembangunan saja, tetapi juga terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Musrenbang perempuan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan metode perencanaan untuk perempuan yang terpecah dengan musrenbang konvensional. Namun, dengan adanya musrenbang perempuan dapat mendorong tingkat partisipasi perempuan dalam musrenbang konvensional sebagai mitra yang sejajar di dalam proses perencanaan. Musrenbang perempuan memiliki beberapa prinsip dasar antara lain terciptanyan keadilan, sensivitas anggaran terhadap kepentingan gender, terjadi proses perembukan yang dialogis, kontra dengan dominasi, menjadi kubu dari kaum rentan, non-diskriminasi dan proses pembangunan yang menyeluruh.[24] Musrenbang perempuan bersifat pra-musrenbang reguler, dilaksanakan sebelum adanya forum OPD.

---

[23] https://kps2k.org/lain-lain/musyawarah-rencana-pembangunan-perempuan-musrenbang-perempuan-di-kabupaten-gresik/ (acces : 05/10/2019 18.15 WIB)

[24] Obrelin Silalahi dan Ratnawati, *Model Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) Responsif Gender di Kota Banda Aceh*, Jurnal Palastren : Vol. 9 No. 1 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan pemaparan mengenai hasil observasi yang pernah dilakukan dengan mengaitkan relevansinya terhadap persoalan yang akan dikaji terkait Musyawarah Rencana Pembangunan Perempuan, antara lain :

Tabel 1.2

Matriks Hasil Penelitian Terdahulu

No	Keterangan Penelitian	Temuan dan Perbedaan Penelitian
1.	Roosganda Elizabeth, *Pemberdayaan Wanita Mendukung Strategi Gender Mainstreaming Dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian di Pedesaan*, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 25 No. 2, Desember 007 : 126-135	Temuan : Tulisan ini bertujuan untuk mengemukaan dan mengkaji berbagai aspek dan pemikiran tentang upaya pemberdayaan wanita tani dalam meningkatan peran, fungsi dan kedudukannya sebagai pendukung strategi pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) di kebijakan pembangunan khususnya pertanian. Upaya pemberdayaan wanita tani dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Litbang Pertanian melalui program Sosialisasi Ekonomi dan Gender (*Socio-economic and Gender Analysis* – SAGA) Perbedaan : Terdapat persamaan aspek penelitian yaitu yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan. Perbedaanya terletak pada sasaran penelitian. Jika penelitian ini berfokus pada pemberdayaan wanita di sektor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		pembangunan pertanian, maka penelitian yang akan di lakukan berfokus pada pelaksanaan keputusan politik di ranah publik khususnya di dalam atmosfir perencanaan pembangunan yang diadakan setiap tahun di tingkat Kabupaten / Kota.
2.	M. Zainal Anwar, *Organisasi Perempuan Dan Pembangunan Kesejahteraan*, Sosiologi Reflektif, Volume 8 No. 1, Oktober 2013	Temuan : Tulisan ini ingin melihat upaya organisasi perempuan dalam membangun kesejahteraan bagi kaum perempuan khususnya yang tinggal di desa. Organisasi perempuan dinilai dapat menjadi kunci penguatan perempuan. Melalui perspektif politik, perempuan perlu terlibat dalam proses tata kelola (*governance*) yang lebih luas termasuk dalam proses pengambilan kebijakan publik sehingga timbullah *alternative income* bagi perempuan. Perbedaan : Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh perempuan baik secara individu maupun kelompok (organisasi) cukup masif dilakukan, salah satunya seperti penelitian tersebut. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada pemanfaatan organisasi sebagai wadah pemberdayaan perempuan untuk lebih sejahtera, maka fokus penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kelanjutan saran penelitian pada tahap yang lebih tinggi mengenai keterlibatan perempuan dalam proses tata kelola dan pengambilan kebijakan publik melalui Musrenbang Perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.	Cahyani Widi Larasakti, *Musrenbang Perempuan Sebagai Arena Perjuangan Kesetaraan Perempuan Di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat*, Skripsi Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta, 2017	Temuan : Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan menguraikan peran Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) dalam memperjuangkan musrenbang perempuan sebagai arena perjuangan kesetaraan perempuan di Kabupaten Lombok Timur. Hasilnya menyebutkan bahwa kegiatan LPSDM dalam berbagai komunitas perempuan di level akar rumput pada akhirnya mampu mendorong perubahan perilaku kelompok perempuan binaan LPSDM yang kemudian juga berdampak pada proses pembangunan yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Timur. Perbedaan : Perbedaannya terletak pada fokus permasalahan yang diteliti. Penelitian yang akan dilakukan mengacu pada Musrenbang Perempuan di Kabupaten Gresik melalui kacamata konsep pengarusutamaan gender (PUG) sebagai salah satu strategi pembangunan. Selain itu, musrenbang perempuan di Kabupaten Gresik cukup efektif dalam mempengaruhi prioritas pembangunan daerah mengingat pelaksanaan strategi PUG itu masih dibilang sangat baru. Hal itu juga tidak terlepas dari kualitas perwakilan perempuan desa yang miskin atau marjinal yang sebelumnya telah dibina dalam kelompok belajar sekolah perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	Obrelin Silalahi dan Ratnawati, *Model Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) Responsif Gender di Kota Banda Aceh*, Jurnal Palastren : Vol. 9 No. 1 Juni 2016	Temuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi secara komprehensif tentang inovasi Musrena di Kota Banda Aceh melalui pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa tumbuhnya motivasi dan kesadaran wanita di tingkat Gampong, Kab/Kota untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran responsif gender. Selain itu, prinsip yang dijunjung antara lain prinsip kesetaraan, anggaran yang berkeadilan gender, musyawarah dialogis, anti dominasi, keberpihakan kepada kelompok rentan, anti diskriminasi dan pembangunan secara holistik. Perbedaan : Musrena di Banda Aceh merupakan inisiasi utama dari Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan LSM demi mewujudkan janji politiknya. Sedangkan musrenbang perempuan di Kabupaten Gresik merupakan inisiasi murni dari LSM yang berangkat dari keberlanjutan program sekolah perempuan untuk lebih di perluas jangkauannya di ranah publik khususnya dalam hal pembangunan.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas, diketahui bahwa berbagai upaya Pemerintah dalam memperhatikan persoalan perempuan telah dilakukan dalam bentuk legislasi. Namun, realita di lapangan masih belum mencapai titik ideal. Salah satu faktor yang mempengaruhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidaksesuaian di lapangan adalah pola pikir tentang gender yang menitikberatkan perempuan di lingkungan domestik. Selain itu, masih terjadi disparitas pemahaman antara kepentingan perempuan yang harus diakomodir oleh perempuan saja padahal jika diamati, kepentingan gender (laki-laki dan perempuan) merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai titik kesejahteraan yang adil baik yang dirasa oleh pria maupun wanita.

Pengarusutamaan gender merupakan awal dari terbukanya ruang partisipasi perempuan yang lebih besar khususnya dalam hal pembangunan. Namun, kehadiran perempuan dalam proses perencanaan pembangunan masih terbilang cukup rendah. Sehingga terdapat beberapa upaya baik dari Pemerintah maupun LSM untuk mengupayakan partisipasi perempuan seperti Musrena dan Musrenbang perempuan. Penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada PUG (Pengarusutamaan Gender) dan Musrenbang Perempuan di Kabupaten Gresik. Meskipun terdapat beberapa kesamaan mengenai urgensi pengarusutamaan gender, namun penelitian ini berupaya untuk memperlihatkan realita lapangan mengenai pengarusutamaan gender serta kontribusi Musrenbang Perempuan dalam mengakomodir pembangunan bagi perempuan di Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*)

Pengarusutamaan gender atau biasa dikenal *gender mainstreaming* dapat dipahami sebagai sebuah konsep dan strategi. PUG sebagai konsep dipahami sebagai ruang *political will* dan *politic discours*e dalam setiap program dan kebijakan Pemerintah yang mengintegrasikan perspektif gender untuk memperkecil persoalan ketidakadilan gender. Sedangkan PUG sebagai strategi merupakan upaya untuk menciptakan sasaran program pembangunan yang sensitif atau responsif gender baik melalui kampanye, sosialisasi, advokasi dan *training* secara terus menerus terkait penyebaran isu-isu tentang kesetaraan gender misalnya melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, data statistik dan keterlibatan perempuan di ranah publik.[25]

PUG diharapkan menjadi alternatif dalam membentuk suatu kepekaan terhadap responsifitas gender di dalam program pembangunan. Sehingga, teciptalah proses penegakkan hak dan kewajiban kelompok perempuan untuk memperoleh kesamaan peluang, penghormatan dan operasionalitas yang sama di ranah publik.[26]

Upaya mengarusutamakan gender dapat memperkecil hambatan-hambatan yang menyebabkan ketidakadilan gender. Hal terpenting dalam

---

[25] Dian Maharso Yuwono, *Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Pertanian : Kasus Pada Pelaksanaan Program FEATI Di Kabupaten Magelang*, SEPA : Vol. 10 No.1 September 2013 : 140 – 147

[26] Waston Malau, *Pengarusutamaan Gender Dalam Program Pembangunan*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 6 (2) : 125-131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangun kondisi *gender mainstreaming* (PUG) di suatu daerah adalah terbukanya ruang *political will*. Maksudnya, Pemerintah mampu melaksanakan tujuan utamanya dalam memberikan ruang bagi terciptanya kesetaraan gender (*gender equality*). PUG harus menjadi *politic discourse* (wacana politik) atau peletakkan perspektif gender dalam setiap program dan kebijakan Pemerintah yang diharapkan akan melahirkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Salah satu upaya atau langkah pertama yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk menciptakan *political will* akan *gender mainstreaming* adalah dengan terus-menerus melakukan kampanye untuk penyebaran isu-isu tentang kesetaraan gender misalnya melalui pendidikan, data statistik yang menunjukkan situasi terbaru mengenai keadaan perempuan dan laki-laki di suatu wilayah. Selain itu, keterlibatan perempuan di ranah publik khususnya dalam proses politik pengambilan keputusan. Tanpa intervensi perempuan secara penuh, *political will* untuk *gender mainstreaming* dirasa sulit untuk diwujudkan.[27]

Terdapat tujuh prasayarat kelembagaan PUG, antara lain :[28]

1. Komitmen dari Pemerintah Daerah berupa aturan tertulis yang berisfat mengatur (*regelling*) dan mengikat untuk menciptakan seluruh komponen daerah melaksanakan pencapaian Pengarusutamaan Gender.

[27] Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaanya di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011) hlm

[28] Indra Kertati, *Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Semarang*, (Semarang : Jurnal RIPTEK Vol. 13 (I) 57-64) hlm 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Komitmen tersebut diterjemahkan dalam bentuk kebijakan, surat keputusan, dan lain sebagainya sebagai bentuk operasionalisasi dari peraturan daerah atau aturan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan Pengarusutamaan Gender.
3. Kelembagaan berupa struktur dan mekanisme Pemerintah daerah maupun *stakeholder* dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender.
4. Sumberdaya terbagi menjadi dua yaitu potensi manusia yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan PUG dan potensi anggaran berupa kontribusi Pemerintah Daerah untuk mencantumkan kebutuhan gender dalam APBD.
5. Ketersediaan data terpilah gender dalam *baseline* yang di *update* dan dipergunakan.
6. Data terpilah gender kemudian dianalisa dengan piranti PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender).
7. Ketersediaan ruang bagi partisipasi masyarakat baik yang tergabung dalam sebuah organisasi maupun kelompok swasta dengan komitmen menyelesaikan persoalan isu-isu gender.

Dengan adanya pelaksanaan PUG (*gender mainstreaming*), kebijakan Pemerintah akan lebih menitikberatkan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Utilitas lain yang berhasil didapatkan adalah tersedianya ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat langsung pada isu gender. Dengan berjalannya konsep PUG, optimalisasi potensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gender akan berjalan maksimal.[29] Analisis gender dalam PUG merupakan proses identifikasi dan pemahaman pola hubungan perempuan dan laki-laki mengenai pembagian kerja atau peran yang timpang, peluang dan otoritas terhadap berbagai potensi pembangunan, keikutsertaan melalui tahapan pembangunan serta keuntungan yang akan diperoleh.[30]

Sebagai upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender, setiap Pemerintah Daerah juga memiliki *Focal Point Gender* (FPG) dan Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang masing-masing memilii fungsinya masing-masing. FPG merupakan aparatur SKPD (Satuan Perangkat Pemerintah Daerah) yang memiliki kapasitas untuk mengarusutamakan gender di setiap unit oeprasionalnya. FPG terdiri dari pemangku dan/atau pekerja biasa yang berfokus pada aspek pemberdayaan perempuan ataupun yang lainnya mampu merangkap sebagai koordinator dari pelaksanaan tugas FPG. Sedangkan Pokja PUG merupakan tempat konsultasi yang ditujukan bagi pengelola dan pengambil inisiatif pengarusutamaan gender dari beragam instansi atau organisasi di tingkat regional. Di setiap SKPD telah dibentuk Pokja PUG dengan susunan keanggotan adalah seluruh Kepala atau pimpinan SKPD.[31]

---

[29] Ibid,. hlm
[30] Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
[31] Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. WAD (Women And Development)

Munculnya tindakan diskriminatif dalam teroi WAD bermula pada sebuah penafsiran atau asumsi terhadap diferensiasi biologis antara laki-laki dan perempuan. WAD menitikberatkan bahwa pemicu dari perilaku eskploitasi tidak hanya datang dari aktivitas produksi maupun reproduksi, melainkan kontribusi yang datang dari konstruksi sosial atas kegiatan produksi dan reproduksi. Asumsi WAD bersumber dari buah pikiran feminis sosialis mengenai pembangunan yang diadopsi dari pemikiran neo-marxis. Menurutnya, pembangunan merupakan bagian dari proses ketergantungan (*dependencia*) yang berimplikasi pada terbentuknya kondisi keterbelakangan.[32]

WAD menjadi salah satu rancangan feminis yang hadir pada masa terakhir tahun 1970-an, berangkat dari rasa kepedulian terkait parokial *modernitation theory*. WAD menitikberatkan relevansi antara perempuan dengan pembangunan melalui pengembangan dan peningkatan pendapatan perempuan.[33] WAD ingin memperlihatkan bahwa perempuan merupakan aspek penting dalam ekonomi dan kerja di dalam lingkup domestik yaitu rumah tangga dan komunitasnya untuk mengawal aktivitasnya dalam masyarakat. Pendekatan WAD memiliki asumsi bahwa kedudukan

---

[32] Richard Peet dan Elaine Hartwick, *Theories of Development*, (New York : The Guilford Press, Chapter 6 : *Feminist Theories of Development*, 1999) hlm 183 dalam Laily Muthmainnah, *Kritik Feminis Terhadap Developmentalisme*, (Jurnal Filsafat : Volume 18, No. 3, Desember 2008) hlm 324

[33] Tri Handayani dan Sugiartu, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2006) hlm 37 dalam Een Endasari, *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Program Rural Infastructure Support – PNPM Mandiri Di Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Tahun 2014*, (Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 2 No. 1 Agustus 2017) hlm 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan menjadi lebih baik selagi struktur internasional juga menjadi lebih seimbang. Namun, pendekatan ini memiliki batasan dalam mengindahkan penyumbangan kapasitas perempuan untuk mempertahankan keluarga dan rumah tangga.[34]

Para simpatisan pendekatan WAD memiliki pandangan bahwa kelompok perempuan sulit memperoleh porsi dari kemaslahatan keadilan pembangunan yang merata apabila persuasifitas budaya patriarkhi masih belum dapat dikendalikan. WAD berasumsi bahwa mengatasi persoalan kemiskinan dan implikasi kolonialisme merupakan aspek penting dalam mengkampanyekan kesetaraan gender ke dalam tahapan pembangunan.[35] Permasalahan *patriarkhi* (kekuasaan laki-laki) dalam teori WAD harus dituangkan dalam *mode of production analysis*.

Dapat dilihat bahwa terdapat empat faktor yang menjadi tolak ukur dalam mempengaruhi ketimpangan yang berlangsung pada perempuan dan laki-laki (GAP / *Gender Analysis Pathway*) sebagai subyek pembangunan, antara lain :[36]

1. Akses, merupakan kapasitas dalam menggunakan sumberdaya melalui partisipasi yang aktif juga produktif baik melalui segi politik, sosial

[34] Dewi Kurniasih, *Perwujudan Keadilan dan Kesetaraan Gender*
[35] Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007) hlm 202-209 dalam Ulfatun Hasanah, *Gender Dalam Dakwah Untuk Pembangunan : Potret Keterlibatan Perempuan Dalam Politik*, (Jurnal Ilmu Dakwah : Volume 38, No. 2, Juli-Desember 2018 ISSN 1693-8054) hlm 262
[36] Endang Swastuti, "Strategi Pengarusutamaan Gender Sebagai Upaya Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Millenium Di Kabupaten Banjarnegara", *Media Ekonomi dan Manajmen*, Vol.25 No. 1 Januari 2012, hlm 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ekonomi di setiap proses pembangunan seperti tenaga kerja, informasi, pelayanan, manfaat dan pekerjaan)

2. Partisipasi atau *Who does what ?*, keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam berkontribusi di setiap tahapan pembuatan keputusan khususnya pembangunan.
3. Kontrol atau *Who has what ?*, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berperan untuk menggunakan sumberdaya dalam proses pembangunan.
4. Manfaat, *Who get what ?*, melalui ketiga proses tersebut artinya memperbesar peluang perolehan kesamaan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

WAD memilih untuk fokus pada relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Perempuan mampu memainkan karakter penting dari sudut ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, peran produktif dan reproduktif juga dapat dilakukan oleh perempuan. Namun, marak terjadi berlangsungnya tindakan opresi dan marjinalisasi terhadap perempuan ketika ruang kapitalisme dalam tingkatan global mulai terbuka, misalnya dalam hal tenaga perempuan utuk bekerja dibayar murah di genggaman MNC/TNC. Pembagian tugas yang didasarkan secara struktural antara laki-laki dan perempuan atau dengan kata lain *Patriarchal division of labour* berdampak pada terjadinya subordinasi manusia dimana laki-laki memiliki kuasa lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas perempuan. Hal ini kemudian dipromosikan secara terus menerus melalui pendidikan dan media massa.[37]

Patriarki sebagai basis analisis kapitalisme mesti dipadukan dalam kajian *mode of production* dengan alasan agar kontribusi perempuan di sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan status atau otoritasnya tidak menjadi beban ganda dan budak sistem karena tidak dibarengi dengan manuver perubahan terhadap norma kultural di lingkup rumah tangga. WAD di tahun 1979 mampu melahirkan CEDAW (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) sebagai dasar bagi sebagian besar negara sebagai faktor pendorong terciptanya kesamaan dan keadilan atas hak kelompok perempuan di setiap lini kehidupan bernegara.[38]

[37] Laily Muthmainnah, *Kritik Feminis Terhadap Developmentalisme*, (Jurnal Filsafat : Volume 18, No. 3, Desember 2008) hlm 324
[38] Yeni Sri Lestari, *Gender dan Pembangunan Perempuan di Aceh Pasca Konflik dan Tsunami : Pembahasan Teoritis*, (Communitty : Volume 3 No. 1, April 2017 ISSN : 2477-5746) hlm 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kerangka Analisis

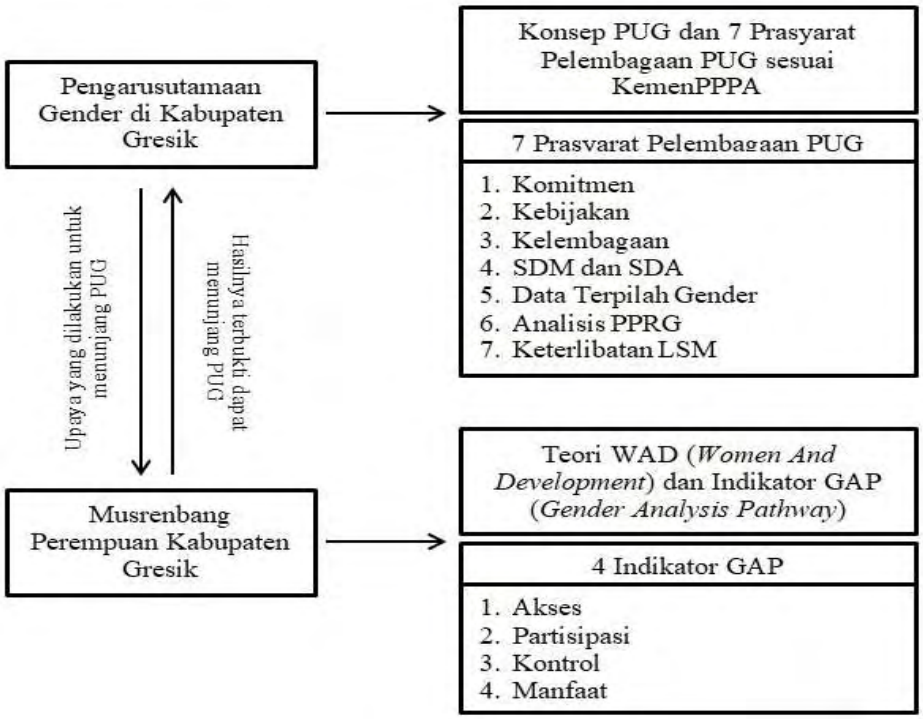

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Pengarusutamaan Gender dan Musrenbang Perempuan memiliki relasi yang saling mempengaruhi apabila dilihat melalui pisau analisis sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gresik dianalisis melalui perspektif konsep PUG dengan pemenuhan 7 prasayarat pelembagaan PUG yang sesuai dengan amanah KemenPPPA (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) terkait pembangunan yang berspektif gender.
2. Salah satu bentuk PUG tersebut telah direfleksikan melalui Musrenbang Perempuan yang sesuai dengan cita-cita teori WAD (*Women And Development*) dan indikator GAP (*Gender Analysis Pathway*) dalam menunjang peningkatan PUG di Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti. Jenis penelitian ini menerapkan suatu alur atau tahapan penelitian yang akan melahirkan pemaparan data secara deskriptif baik dalam bentuk ujaran atau catatan dan tingkah laku orang yang sedang diamati. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memperoleh sebuah asumsi yang bersifat umum terhadap realitas sosial melalui sudut pandang partisipan. Jenis penelitian ini menganggap bahwa teori merupakan pijakan awal dalam membangun paradigma berpikir untuk memfokuskan penelitiannya. Kualitatif riset beroperasi di dalam *natural setting* melalui upaya untuk membangun kesepahaman, pemberian eksplanasi terhadap pengamatan fenomena yang dilihat berdasarkan reaksi yang diutarakan oleh subyek penelitian kepada peneliti. Penelitiana kualitatif mengikutsertakan pemanfaatan dan penghimpunan data empiris semacam pengalaman perseorangan, proses tanya jawab, studi kasus (*field research*), observasi atau pengamatan dan hubungan interaksi secara audiovisual.[39] Proses yang dilalui dalam memanfaatkan jenis penelitian kualitatif adalah dengan memadukan pemanfaatan data dan teori sebagai upaya dalam merangkai pembahasan.[40]

[39] Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif* (Equilibrium, Vol. 5 No. 9 Januari-Juni 2009)
[40] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Subyek dan Lokasi Penelitian

Peneliti menggunakan subyek penelitian berdasarkan metode kualitatif yang dikenal dengan istilah narasumber atau informan. Peneliti memfokuskan pencarian informasi pada aktor-aktor yang terlibat dalam proses Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik tahun 2019. Penunjukkan subyek untuk pelaksanaan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Ciri-ciri khusus dari teknik tersebut adalah dengan membuat kriteria tertentu dalam pemilihan informan atau narasumber. Adapun informan terbagai dalam dua kluster untuk memberikan informasi terkait fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Informasi mengenai komitmen pengarusutamaan gender di internal Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik :
   - Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah), dengan pertimbangan :
     - Memiliki wewenang dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan daerah.
     - Memiliki posisi sebagai ketua di dalam Kelompok Kerja PUG di sektor perencanaan pembangunan.
     - Memiliki otoritas dalam melaporkan program pembangunan daerah di setiap tahunnya.
     - Sebagai penyelenggara Musrenbang dalam mengakomodir berbagai usulan pembangunan daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Dinas KBP3A (Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
  - Menjadi *leading sector* dalam melaporkan kondisi kesejahteraan yang berkaitan dengan perempuan di Kabupaten Gresik.
  - Memiliki tugas dalam memberdayakan perempuan terutama upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang pembangunan.
  - Bekerjasama dengan Bappeda melalui posisinya sebagai sekretaris di dalam Kelompok Kerja PUG di sektor perencanaan pembangunan

2. Informasi mengenai kontribusi Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik tahun 2019 dalam mengakomodir pembangunan bagi perempuan :

- LSM KPS2K
  - Memiliki fungsi dalam mengkritisi kinerja Pemerintah Daerah khususnya di bidang persoalan-persoalan perempuan di Jawa Timur.
  - Memiliki *track record* dalam menginisiasi Sekolah Perempuan dan Musrenbang Perempuan di Kabupaten Gresik.
  - Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam mengawal proses pembangunan yang berspektif gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Leader* Sekolah Perempuan Wringinanom
  - Kelompok perempuan miskin dan marjinal tetapi telah memiliki pemahaman tentang seks dan gender.
  - Representasi dari kelompok perempuan pra-sejahtera yang menerima manfaat dari proses pembangunan.
  - Sekolah Perempuan Wringinanom terjamin kapasitasnya sebagai perempuan miskin dan marjinal karena merupakan *pilot project* yang sudah dilakukan sejak tahun 2013.
  - Kelompok perempuan yang terlibat dalam penginisiasian Musrenbang Perempuan di Kabupaten Gresik.

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Gresik karena pelaksanaan Musrenbang Perempuan baru dilaksanakan dua kali mulai dari tahun 2018. Selain itu, juga memuat beberapa pertimbangan antara lain :

1. Populasi penduduk yang ada di Kabupaten Gresik di tahun 2017 sebesar 1.313.826 jiwa. Angka pemberdayaan perempuan/IDG tahun 2017 hanya ada 63,35 perempuan di kabupaten Gresik yang mampu berperan dalam pembangunan di bidang ekonomi dan kepemimpinan perempuan di ranah publik. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa kabupaten Gresik masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat untuk meningkatkan kelompok perempuan yang berjumlah 36,65 persen agar mereka juga dapat menjadi aktor pembangunan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara otomatis dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang sedang dilaksanakan.

2. Komitmen pemerintah Kabupaten Gresik melalui anggaran daerah belum memasukkan unsur yang responsif gender. Hal ini terlihat dari besaran anggaran yang ada pada dinas KBPP dan PA yang dikhususkan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di kabupaten Gresik sebesar Rp.471.062.000 dari Rp. 11.840.376.787 pada tahun anggaran 2018 atau hanya sebesar 3,9 persen saja. Melalui penaksiran anggaran yang dapat dikatakan sangat kecil ini maka usaha yang dilakukan untuk menunjang taraf perempuan di dalam pembangunan masih terlihat mustahil.[41]
3. KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan) merupakan salah satu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pemerhati perempuan yang beroperasi di Kabupaten Sidoarjo menjadikan salah satu program utamanya untuk perempuan di Gresik melalui program *Gender Watch* seperti dibentuknya sekolah perempuan hingga penginisiasian Musrenbang Perempuan di Kabupaten Gresik. Ditambah lagi dengan forum Musrenbang Perempuan yang belum tentu dilaksanakan di setiap daerah.

[41] https://kps2k.org/lain-lain/musyawarah-rencana-pembangunan-perempuan-musrenbang-perempuan-di-kabupaten-gresik/ (acces : 05/10/2019 18.15 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Teknik Pengumpulan Data

Proses penghimpunan data diterapkan melalui beberapa teknik, antara lain : [42]

1. Wawancara (*interview*)

   Wawancara atau metode tanya jawab merupakan prosedur yang dapat dilakukan dalam memperoleh penjelasan mengenai data penelitian yang dilakukan antara peneliti dengan informan yang diwawancarai. Proses ini dapat dilakukan melalui pedoman wawancara yang terstruktur maupun tidak. Dalam hal ini peneliti menggunakan model wawancara terstruktur melalui *guide interview*.

2. LGD (*Leaderless Group Discussion*)[43]

   LGD merupakan sebuah metode dalam menggali informasi pada 5-6 orang secara lagsung. Dalam hal ini, LGD tidak menitikberatkan pada dominasi salah satu anggota. Setiap anggota memiliki potensi yang sama dalam proses penyampaian informasi. Peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang kemudian mendapat respon yang beragam dari setiap anggota LGD.

3. Pengamatan atau Observasi

   Sejumlah data atau informasi yang dapat diperoleh dari rangkaian proses observasi meliputi *space* atau ruang dan tempat, aktor yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, aktivitas atau perbuatan, sasaran objek penelitian, suatu insiden atau rangkaian

[42] Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif* (Equilibrium, Vol. 5 No. 9 Januari-Juni 2009)
[43] https://www.weare.id/perbedaan-fgd-dan-lgd/ (acces : 07/03/2020 15.33 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peristiwa, batas waktu sampai pada pengungkapan perasaan. Observasi ini memiliki tujuan dalam memaparkan ilustrasi secara realistik yang didapatkan melalui sebuah aktivitas atau peristiwa sebagai upaya untuk menanggapi persoalan yang diteliti serta sebagai bahan penilaian.

4. Kajian Literatur

Kajian literatur dapat dijalankan melalui metode eksplorasi atau pencarian, menghimpun dan menjajaki berbagai referensi atau kepustakaan yang masih memiliki relasi dengan rangkaian penelitian.

5. Dokumentasi

Sebagian besar data yang akan maupun sudah diperoleh, tersimpan atau akan disimpan dalam bentuk pengarsipan dokumentasi misalnya warkat atau surat-surat, *daily note* atau catatan harian, tulisan laporan dan souvenir atau cinderamata.

D. Teknik Analisis Data

Pengelolaan dan telaah data dengan metode kualitatif terdiri dari beberapa tahapan, antara lain :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah alur dalam memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, melakukan abstraksi dan mentransformasikan peroleh data awal yang didapatkan dari proses penulisan catatan lapangan. Aktivitas dalam mereduksi data dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara rutin sepanjang proses penghimpunan data di lapangan. Model analisis dalam proses reduksi data dilakukan melalui pengerucutan, pengklasifikasian, pengorientasian dan pemilahan data yang dianggap perlu dan tidak perlu. Proses ini dilakukan mulai dari tahapan penelitian saat di lapangan sampai pada penyusunan laporan akhir.

2. Triangulasi

Triangulasi berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap keshahihan data dengan memanfaatkan data lain sebagai pembanding hasil *interview* yang dilakukan pada sasaran objek studi riset. Triangulasi bertujuan untuk menunjang intensifikasi terhadap teori, metodologi maupun sebagai proses interpretasi peneliti terhadap hasil penelitian.

3. Penyajian Data

Proses penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan tatanan pada rangkaian informasi berbentuk teks naratif. Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

4. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan ketika pengolahan dan analisis data telah selesai dilakukan. Kesimpulan berisi teks naratif yang secara terperinci menjelaskan mengenai temuan-temuan yang ada di lapangan. Kesimpulan bertujuan untuk memudahka pembaca dalam memberi gambaran mengenai hasil temuan yang telah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Validitas, autentifikasi data, dan keaslian data yang dihimpun dan dianalisis mulai sedari awal dapat memastikan realitas dan keshahihan hasil penelitian serasi dengan persoalan dan inti penelitian. Agar studi riset ini dapat mengantarkan pada hasil yang benar, maka penelitian ini dapat mengaplikasikan beberapa metode, antara lain : [44]

1. Intensitas peneliti di lapangan dalam menggali informasi melalui LSM KP2K dan jajaran Pemerintah Daerah yang terlibat dalam proses Musrenbang Perempuan tahun 2019. Kebenaran dan keakuratan data cenderung ditentukan oleh keseriusan dan keterlibatan peneliti secara dekat dalam penelitian baik dalam diskusi, dan rapat yang diadakan gerakan ini.
2. Meninggikan kegigihan dalam proses pengamatan. Kegiguhan dalam proses pengamatan memiliki implikasi dalam menentukan kebenaran dan keakuratan data yang terkumpul. Agar didapati penelusuran terhadap fenonema secara holistik.
3. Melangsungkan proses triangulasi sesuai prosedur. Tahapan ini berguna untuk terus menggali titik jenuh. Kesamaan informasi dari tiap narasumber atau sumber data lainnya. Triangulasi menjadi salah satu metode untuk untuk memperoleh temuan data dan pemahaman data yang lebih valid.

[44] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm 395-397

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mengacu pada penggunan sumber literatur yang tepat. Terujinya data dan informasi yang telah dihimpun dan diabadikan dalam bentuk tulisan akan cenderung dipercaya apabila dilengkapi dan bahan-bahan referensi yang tepat. Eisner menggagas ide penggunaan referensi yang akurat untuk menunjang kredibilitas data yang telah dihimpun secara tertulis.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Setiap penelitian ilmiah mempunyai proses yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan mendasarkan pada nilai yang logis, dapat dipertanggungjawabkan dan terstruktur. Alur penelitian yang digunakan sesuai dengan model kualitatif. Penelitian ini memiliki 3 tahapan antara lain : tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan.

Pertama, tahapan perencanaan penelitian. Meliputi penyusunan studi reiset yang diaplikasikan dengan penentuan tema, objek dan subjek penelitian. Tema yang ditentukan berupa perempuan dan proses politik, objeknya ditemukan dalam proses Musrenbang Perempuan, subjeknya terdiri atas keterlibatan perempuan beserta dengan jajaran Pemerintah Daerah yang hadir pada waktu Musrenbang perempuan dilakukan. Penentuan tersebut berdasarkan relevansi dan urgensi atas fenomena politik dalam proses pembangunan yang mendiskriminasi perempuan untuk terlibat. Selain itu, perencaan penelitian juga meninjau studi pustaka dengan melihat penelitian terdahulu, mengkaji metodologi, menganalisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan teori yang sesuai serta menyusun *guide interview* atau pertanyaan penelitian. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam, peneliti juga menggali informasi dengan cara berdiskusi dengan orang-orang yang berperan langsung dalam proses Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik tahun 2019.[45]

Kedua, tahap pelaksanaan penelitian meliputi pengumpulan data lapangan yang diperoleh dari interaksi intens dengan sasaran subyek penelitian seperti LSM KPS2K, Bappeda, Dinas KBP3A, Dinas KB dan *leader* sekolah perempuan yang mewakili diri sebagai peserta Musrenbang Perempuan tahun 2019. Selanjutnya, *editing data* bermaksud untuk mengumpulkan dan mengelompokkan informasi yang dipakai dalam meninjau kebutuhan atas penelitian ini yang didapat dari perolehan pelaksanaan eksplorasi mendalam di lapangan melalui pengamatan maupun proses tanya jawab. Analisis data karena pada saat penghimpunan data lapangan dalam studi riset model kualitatif tidak harus menunggu data terkumpul semuanya. Dengan cara melakukan reduksi data atau tahapan analisis. Upaya tersebut dapat dilakukan apabila sudah ada pedoman pertanyaan. Pedoman pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sementara atau semi terstruktur. Karena dalam kondisi perkembangan nantinya subjek penelitian akan digambarkan natural. Pengumpulan data juga bisa ditelusuri ke beberapa studi pustaka. Apabila semuanya sudah terkumpul upaya analisis dan editing sangat ditekankan.

[45] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mencapai tingkat pemahaman suatu fenomena melalui dunia pemahaman pelaku (subjek penelitian) sangat penting dalam pengumpulan data.[46]

Ketiga, tahapan pelaporan penelitian atau sesudah penggalian data dilapangan, meliputi penulisan laporan penelitian atas data yang sudah terkumpul mengenai implementasi dan efektivitas Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik tahun 2019, melakukan *review* untuk meninjau kembali agar tidak ada data yang terlewat, dan penyajian laporan penelitian yang disusun secara sistematis. Karena dalam upaya ini bagaimana proses keseluruhan penelitian dapat disusun dengan telaah holistik. Seperti bagaimana perspektif dari subjek penelitian dan bagaimana fenomena yang terjadi sebagaimana adanya. Serta tahapan terakhir ini akumulasi keseluruhan dari wujud konkret dari tema, masalah, metode sampai manfaat penelitian itu sendiri. Tentunya, upaya tersebut akan dipaparkan dalam koridor keterlibatan perempuan dalam proses politik pembangunan di Kabupaten Gresik. pada tahapan awal hingga akhir penelitian, perolehan data yang disajikan harus akurat dan selaras maka kesimpulan yang dihasilkan bersifat kredibiltas.[47]

G. Sistematika Pembahasan

Berikut dipaparkan penyusunan kajian pembahasan dalam memberikan deskripsi secara jelas :

---

[46] Burhan Bungin, *Analisis Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), hlm 67

[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), hlm 330

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bab pertama, mendekripsikan terkait pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan agar pembaca mendapatkan gambaran yang lengkap untuk memahami urgensi penelitian yang diangkat.
2. Bab kedua, berisi tentang kajian teoritik, teori yang dipakai adalah Pengarusutamaan Gender dan *Women and Development* (WAD).
3. Bab ketiga, berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subjek penelitian dan informan, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pemeriksaan keabsahan data.
4. Bab keempat, membahas mengenai penyajian dan analisis data yang memaparkan hasil data sesuai dengan yang terjadi di lapangan serta proses analisisnya terhadap pengarusutamaan gender dan *Women and Development* (WAD) dalam Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2019.
5. Bab kelima, memiliki fokus pembahasan terkait penutup yang meliputi kesimpulan dan saran rekomendasi dan keterbatasan mengenai penelitian ini.

H. Jadwal Penelitian

Waktu penelitian diagendakan dengan rentang waktu selama empat bulan mulai Oktober minggu pertama sampai dengan Januari pertengahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut susunan gerakan penelitian yang dapat diamati melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Uraian	Oktober				November				Desember				Januari			
		Minggu Ke															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perencanaan Penelitian																
2.	Persiapan Penelitian																
3.	Penyusunan Proposal																
4.	Seminar Proposal																
5.	Pelaksanaan Penelitian																
6.	Laporan Penelitian																

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PEREMPUAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019

A. Setting Lokasi Penelitian

Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah yang baru saja mengikuti evaluasi pelaksanaan PUG (Pengarusutamaan Gender) di tahun 2016. Di tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan evaluasi PUG Kabupaten Gresik hanya sebatas pengisian dan pengiriman format. Namun, di tahun 2016 Kabupaten Gresik bersama dengan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) terkait telah berkomitmen untuk mengikuti dan mengisi aplikasi evaluasi PUG. Komitmen ini kemudian membuahkan hasil berupa penghargaan dengan kategori Madya. Latar belakang pencapaian prestasi tersebut tidak terlepas dari peran KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan) yang merupakan *Non Government Organization* dalam menginisiasi program berbasis PUG yang dinamakan dengan *Gender Watch*. Program tersebut telah dimasukkan ke dalam inovasi Kabupaten Gresik yang kemudian mengantarkan pada peningkatan prestasi dengan predikat kategori Madya Utama di tahun 2018.[48]

Kondisi pengarusutamaan gender di Kabupaten Gresik berkaitan erat dengan ciri khas daerah sebagai kota dua wali dan kota pereka banyak santri. Kota wali ditandai dengan adanya dua wisata religi yang menjadi

[48] Soeraningsih Kasub bidang Pelayanan Keluarga Berencana Gresik, hasil wawancara pada 29 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan ziarah dari berbagai lintas daerah yaitu tempat peristirahatan terakhir Raden Paku (Sunan Giri) dan Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sedangkan kota santri berkaitan erat dengan berdirinya jumlah pondok pesantren, sekolah sampai perguruan tinggi yang bernuansa islami.[49] Kentalnya budaya agamis yang ada di Gresik menjadi salah satu nilai plus sekaligus juga menjadi tantangan percepatan PUG. Artinya, patriarki atau pemahaman yang bias gender di Kabupaten Gresik terletak pada penafisran-penafsiran agamanya dimana posisi perempuan di nomor duakan atas laki-laki. Salah satunya adalah pemahaman agama mengenai perempuan yang tidak perlu dihadirkan dalam sebuah musyawarah mulai dari lingkungan keluarga dimana peletakan benar salah nya keputusan suami atau kepala rumah tangga tetaplah dianggap benar.[50]

Peran ulama atau biasa disebut dengan tokoh agama memiliki pengaruh yang dominan mengingat kekultusan dan homogenitas masyarakat Gresik pada ajaran agama islam. Berdasarkan data BPS Gresik dalam Angka 2018 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin sebesar 1.313.826 dengan keyakinan yang dianut sebagai berikut :[51]

[49] gresikkab.go.id/profil/sejarah (acces : 15/02/2020 16.27 WIB)
[50] Lusianah *Leader* Anggota Sekolah Perempuan Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringnanom Kabupaten Gresik, hasil wawancara pada 1 Februari 2020
[51] Kabupaten Gresik dalam Angka 2018 : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. Hlm 38 & 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-Laki	Perempuan
Jiwa	
661.145	652.681
Total = 1.313.826	

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut

Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya
Jiwa						
1.296.498	11.208	3.172	2.024	704	7	213

Sumber : Gresik Dalam Angka 2018

Kuantitas populasi penduduk dengan jenis kelamin (*sex*) laki-laki memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan perempuan membuat semakin langgengnya dominasi laki-laki atas perempuan terutama di lingkup keluarga. Selain itu, lebih dari 60% penduduk Kabupaten Gresik menganut agama islam. Hal tersebut akhirnya berpengaruh pada perefleksian fatwa ulama terhadap kehidupan sehari-hari khususnya dalam hal pemahaman yang bias gender. Pandangan ulama terkait perempuan dinggap bias dan misoginis karena perspektif lama yang masih digunakan untuk memarginalisasi perempuan, yang sebenarnya tidak dapat menjadi pembenaran oleh nalar maupun agama, meskipun para ulama telah memanfaatkan dalil agama sebagai pegangan.[52] Misalnya, melalui konotasi

[52] Naqiyah Mukhtar, *M. Quraish Shihab "Menggugat Bias Gender Para Ulama"* (Journal of Quran and Hadith Studies – Vol. 2, No. 2, 2013 :189-208) hlm 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadits yang menyebutkan bahwa wanita kurang akal dan agamanya berujung pada pembentukkan konstruksi sosial yang tidak memperkenankan perempuan terlibat dalam memutuskan sesuatu (musyawarah).

Hadits tersebut kemudian digugat oleh M. Quraish Shihab karena menurutnya, berbagai urusan yang dapat dirundingkan mampu meliputi banyak hal mulai dari persoalan di lingkungan keluarga hingga perkara sosial di lingkungan masyarakat, kecuali permasalahan yang telah digariskan oleh Allah.[53] Seperti peristiwa yang diabadikan melalui QS. Al-Qasas : 26 yang berbunyi :[54]

> "*salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya".*

Sehingga, kerapnya pertemuan antara keyakinan masyarakat dengan penafsiran ulama terkait perempuan, menjadi salah satu tantangan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gresik.[55]

Dalam hal perencanaan pembangunan daerah, model atau tipe yang digunakan oleh Kabupaten Gresik tertuang dalam RPJMD dan RKPD. Di dalam RPJMD dan RKPD disebutkan bahwa perumusan perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui pendekatan *bottom up* dan *top down* yang diselaraskan secara teknokaratis, politis dan partisipatif. Perencanaan

---

[53] Ibid,. hlm 202
[54] QS. Al-Qasas :28 Ayat 26
[55] Lusianah *Leader* Anggota Sekolah Perempuan Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringnanom Kabupaten Gresik, hasil wawancara pada 1 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan ini berangkat dari pengartikulasian (*bottom up*) permasalahan pembangunan dan isu strategis, pelbagai kearifan lokal serta agenda pembangunan baik pusat maupun provinsi. Selanjutnya diselaraskan melalui pendekatan politis terhadap visi misi kepala daerah terpilih dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan. Kemudian, dilakukan penajaman, klarifkasi dan kesepakatan (pendekatan *top down* dan partisipatif) melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk difokuskan dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD).[56]

Mekanisme pengambilan keputusan dalam musrenbang mengacu pada skala prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD. Adapun mekanisme pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1. Usulan yang masuk dalam Musrenbang disesuaikan dengan Pendapatan Daerah dan Belaja Daerah untuk diakomodir.
2. Pembentukan tim penyusun perencanaan untuk mengkaji berbagai usulan.
3. Tim penyusun berangkat dari kondisi daerah yang telah dibuat saat penyusunan RPJMD.
4. Selanjutnya, menentukan skala prioritas pembangunan yang tersurat dalam RKPD.
5. Terakhir, tim penyusun mengisi format "penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan masalah dan penentuan peringkat tindakan".

[56] RPJMD tahun 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Gresik tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Potret Organisasi

a. BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kabupaten Gresik

Profil Bappeda Kabupaten Gresik :[57]

Tabel 4.3
Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Bappeda

Visi	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang aplikatif, integratif dan berwawasan masa depan.
Misi	• Merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang aplikatif, integratif dan berwawasan masa depan. • Merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan ldokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah secara partisipatif. • Mewujudkan peningkatan dukungan data dan informasi yang tepat dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah.
Tugas	Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanaan pengkoordinasian proses penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
Fungsi	• Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis operasioanl perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. • Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis

[57] https://gresik.go.id/profil/bapelitbangda (acces : 04/03/2020 06.16 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	operasioanl perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. • Pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. • Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. • Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. • Pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah. • Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. • Pengkoordinasian penyelenggaraan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. • Penyampaian hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah. • Pemberian rekomendasi izin penelitian. • Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sumber : https://gresik.go.id/profil/bapelitbangda (acces : 04/03/2020 06.16 WIB)

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Gresik :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Bappeda

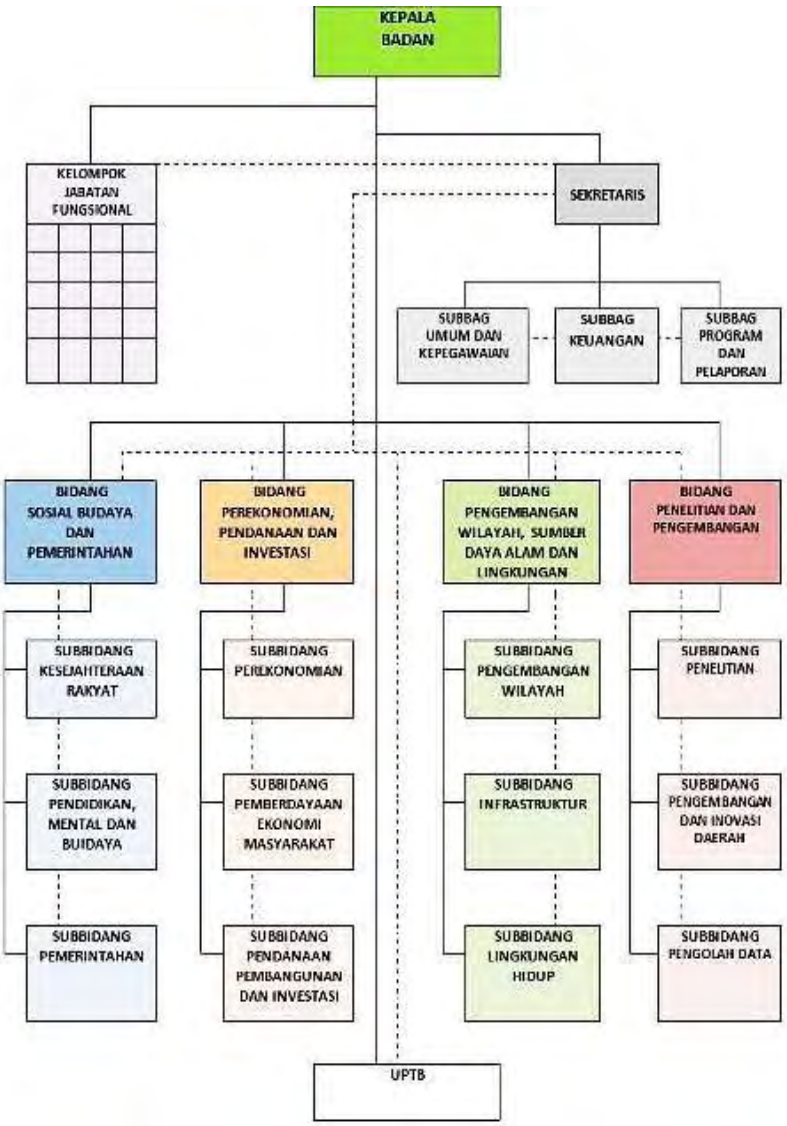

Sumber : https://gresik.go.id/profil/bapelitbangda (acces : 04/03/2020 06.16 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dinas KBP3A (Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Gresik

Profil dinas KBP3A Kabupaten Gresik :[58]

Tabel 4.4

Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Dinas KPB3A

Visi	Penduduk tumbuh seimbang didukung keluarga yang berkualitas dan berkeadilan gender.
Misi	• Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB dan membangun keluarga kecil bahagia dan sejahtera. • Menata kembali pengelolaan program keluarga berencana. • Memperkuat sumber daya manusia operasional program KB. • Meningkatkan ketahaan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. • Menciptakan manajemen KB dan PP yang akuntabel. • Menggalang kemitraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian serta ketahanan keluarga. • Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui program KB.
Tugas	Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk,

[58] https://gresik.go.id/profil/dinas_kb_pp_dan_perlindungan_anak (acces : 04/03/2020 06.16 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Fungsi	• Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. • Pengkooridnasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. • Pengkoordinasian pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. • Pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB petugas lapangan KB dan kader KB serta pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kotrasepsi. • Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemsyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	dan perlindungan anak. • Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB. • Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional. • Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sumber : https://gresik.go.id/profil/dinas_kb_pp_dan_perlindungan_anak (acces : 04/03/2020 06.16 WIB)

Struktur organisasi dinas KBP3A :

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Dinas KB3A

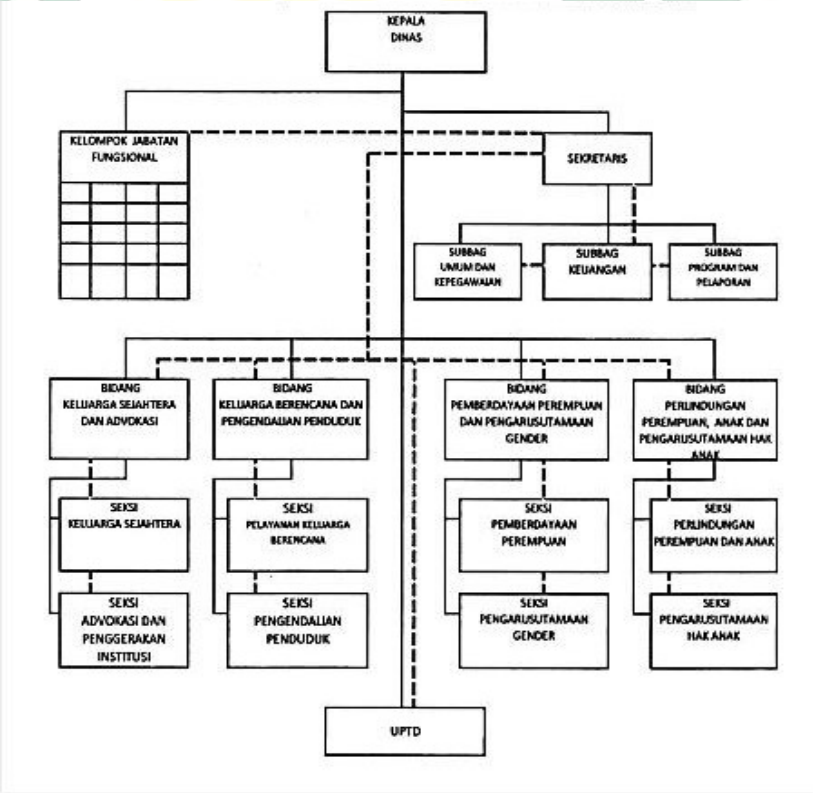

Sumber : https://gresik.go.id/profil/dinas_kb_pp_dan_perlindungan_anak (acces : 04/03/2020 06.16 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. LSM KPS2K

NGO (*Non-Government Organization*) bernama KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan) merupakan jenis perkumpulan yang didirikan dan resmi terdaftar pada tanggal 22 Desember 2005 yang beroperasi di wilayah Jawa Timur. Memiliki kantor yang beralamatkan di Mutiara Residence D5/1 Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang berdirinya KPS2K berangkat dari keresahan-keresahan atas rasa tidak adil yang dialami oleh banyak perempuan mulai di lingkup organisasi sampai di lingkup masyarakat. Respon lingkungan organisasi terhadap persoalan keadilan gender dinilai masih kurang. Selain itu, kondisi memprihatinkan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia yang kurang responsif terhadap kalangan miskin dan marginal juga ikut mewarnai alasan terbentuknya organisasi ini. Oleh karena itu, KPS2K berkomitmen untuk mengembangkan kesadaran kritis terkait kadilan gender yang dirintis oleh empat orang aktifis dengan latar belakang organisasi berbeda yaitu di bidang pengembangan fokus terkait LH (Lingkungan Hidup) dan fokus terkait pengedukasian perempuan.

KPS2K merupakan komponen dari *social movement* atau aktivitas sosial yang memegang komitmen tinggi terhadap nilai demokrasi, keadilan gender, anti kekerasan dan diskriminatif, *personal is political*, pluralism dan profesionalisme. Gerakan sosial ini dapat direfleksikan melalui program *Gender Watch* yang merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah langkah dalam memperjuangkan hak atas perlindungan sosial yang ditujukan pada rakyat miskin, perempuan dan kelompok marginal lainnya. Program tersebut diwujudkan melalui dua strategi besar yaitu (1) *capacity building*membangun dan memperkuat gerakan perempuan miskin (*grassroot*), (2) advokasi, mendorong *stakeholder* atau mereka yang masuk dalam *decision maker* baik yang tergabung di Pemerintah maupun Non-Pemerintah untuk melakukan manuver penghapusan kemiskinan terhadap perempuan.

Visi dari organisasi ini tidak lain untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan gender dan berkedaulatan atas pengelolaan sumber-sumber kehidupan yang adil dan berkelanjutan. Misinya adalah ikut serta dalam :

1. Mewujudkan kondisi masyarakat yang memiliki kesadaran kritis dan berdaya pikir *alternative* melalui advokasi pendidikan.
2. Mengembangkan kesadaran kritis di kalangan masyarakat khususnya perempuan melalui penyelenggaraan pendidikan alternatif.
3. Menumbuhkan wacana kritis melalui penerbitan-penerbitan dan publikasi alternatif.
4. Menumbuhkan saluran atau media-media informasi bagi perempuan melalui pengembangan sistem dokumentasi dan informasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Mengembangkan suatu gerakan bersama yang bersifat plural dan terbuka.
6. Mengembangkan feminisme untuk membangun kesadaran kritis perempuan dalam pengelolaan sumber-sumber kehidupan.
7. Menumbuhkan kepekaan keadilan gender dalam pemahaman isu-isu konflik.

Mitra lembaga KPS2K yang mendukung berbagai program dari organisasi ini antara lain Kapal Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan), MAMPU-DFAT (Mitra - Department of Foreign Affairs and Trade Australia), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), E-net for Justice Indonesia (Jaringan Pendidikan untuk Keadilan Indonesia), ASPBAE-RWS-GCE, *Green Peace South East Asia*, Microsoft Corp, BII Maybank, MICRA dan Terre Des Hommes Netherlands. Sedangkan mitra kerja dari kalangan *stakeholder* antara lain :

1. Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Gresik.
2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Gresik.
3. BPPAUDNI Region IV Jawa Timur.
4. Dinas Sosial, transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kantor pemberdayaan perempuan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Gresik.
6. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Gresik.
7. DPRD Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Gresik.
8. Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur.
9. Komisi Pelayanan Informasi Provinsi Jawa Timur.
10. Badan KB dan PP Provinsi dan Kabupaten, dsb

Isu strategis yang menjadi fokus KPS2K ini antara lain (1) menyikapi dan memperjuangkan HAM (Hak Asasi Manusia) di bidang pendidikan, (2) mengembangkan sumber daya manusia khususnya kaum perempuan yang kritis dan handal, (3) membangun organisasi-organisasi rakyat yang tangguh, (4) mengembangkan konsep pengelolaan atas sumber-sumber kehidupan (hutan dan pesisir) yang berpihak pada kelompok-kelompok marginal khususnya perempuan, (5) Membangun dan menggalang aliansi untuk mendukung perjuangan perempuan terkait kekerasan dan kesehatan reproduksi dan (6) membuka simpul-simpul informasi sehingga memudahkan akses perempuan dengan mudah dan merata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.5

Struktur KPS2K Jawa Timur

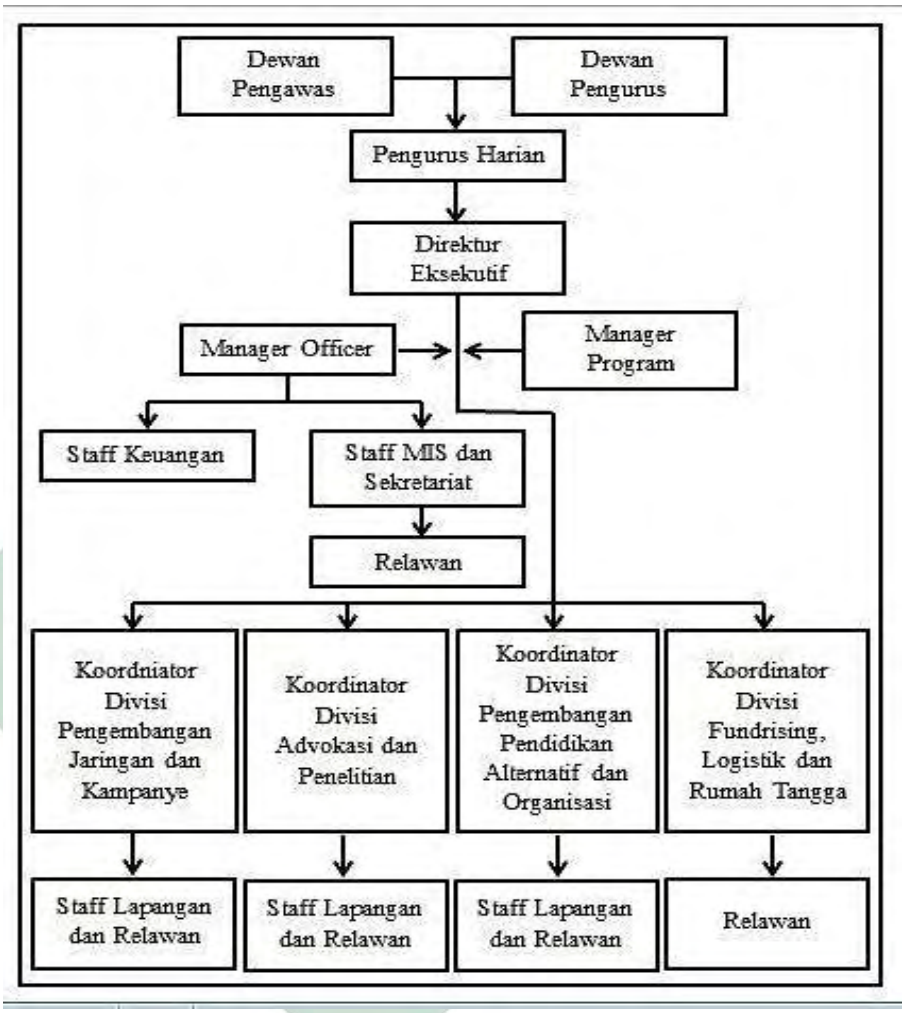

Sumber : Profil organisasi KPS2K, hasil observasi pada 10 Februari 2020

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Dewan Pengawas

Ketua : Mohammad Firdaus

Sekretaris : Kholisoh

Bendahara : Siti Rukhoiyah

Anggota : Badarusman Sasmito

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dewan Pendiri / Pengurus

Ketua : Iva Hasanah

Sekretaris : Rumi Handayani

Bendahara : Fathur Rozi

Anggota : Ahmad Yusron Rizal

c. Pengurus Harian

Direktur Eksekutif : Iva Hasanah

Manager Officer / Program : Rumi Handayani

Accounting : Mareta Ryarsa Hanyfa

Kasir : Roki Arnoldus Nggili

Divisi Pengembangan Pendidikan Alternatif dan Pengembangan Organisasi

Koordinator : Rinta Yusna

Staf : Rinta Yistu Hnadayani

Divisi Pengembangan Jaringan dan Kampanye

Koordinator : Roki Arnoldus Nggili

Staf : Relawan

Divisi Advokasi dan Penelitian

Koordinator : Sinta Yistu Handayani

Staf : Relawan

Divisi MIS dan Kesekretariatan

Koordinator : Roki Arnoldus Nggili

Staf : Relawan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Divisi Logistik dan Fundrising

Koordinator : MZ Mustofa

Staf : Relawan

C. Data dan Analisis Penelitian

A. Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik

Pengarusutamaan gender atau biasa dikenal *gender mainstreaming* dapat dipahami sebagai sebuah konsep dan strategi. PUG sebagai konsep dipahami sebagai ruang *political will* dan *politic discours*e dalam setiap program dan kebijakan Pemerintah yang mengintegrasikan perspektif gender untuk memperkecil persoalan ketidakadilan gender. Sedangkan PUG sebagai strategi merupakan upaya untuk menciptakan sasaran program pembangunan yang sensitif atau responsif gender baik melalui kampanye, sosialisasi, advokasi dan *training* secara terus menerus terkait penyebaran isu-isu tentang kesetaraan gender misalnya melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, data statistik dan keterlibatan perempuan di ranah publik.[59]

Pelaksanaan pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*) dalam perencanaan pembangunan telah diterapkan oleh negara sejak tahun 1995, bersamaan dengan keikutsertaan negara dalam Konferensi Perempuan Sedunia ke-4 di Beijing. Pertemuan

[59] Disampaikan dalam materi Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2020 oleh Suti'ah LKPP Jawa Timur (13 Februari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut membahas mengenai ratifikasi peletakan kesetaraan gender dalam proses pembangunan manusia di setiap negara. Dukungan ratifikasi tersebut di desak lagi melalui dokumen yang berisi tentang penghapusan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan atau dikenal dengan nama CEDAW (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*).[60] Lalu, mulai tahun 2000 Pemerintah mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) nomor 9 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. Dalam Peraturan Presiden Nomor Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan aspek yang harus dilaksankan disamping aspek *Suistainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan) dan *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang baik).

Kemudian, beberapa regulasi tersebut dikuatkan lagi pada tahun 2004 melalui Undang-Undang nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian, tahun 2013 diundangkan Surat Edaran Bersama Menkeu (Menteri Keuangan), MenPPN, Mendagri (Menteri Dalam Negeri), Meneg PP & PA (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) tentang Strategi Nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Di tingkat daerah, pelaksanaan PUG di amanatkan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15

[60] Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaanya di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011) hlm 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah. Pelaksanaan PUG di tingkat daerah juga mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.[61] Kebijakan yang selaras dengan kesetaraan gender juga dilakukan di daerah Gresik melalui Perda nomor 4 tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender.[62]

Berbagai payung hukum tersebut dibentuk sebagai upaya memperbesar peluang perempuan baik dari segi keterlibatan maupun perolehan manfaat pembangunan yang masih rendah dibandingkan dengan laki-laki, khususnya di Kabupaten Gresik. Sudah cukup banyak produk kebijakan yang menyerukan aspek pengarusutamaan gender (PUG) untuk dijadikan isu lintas bidang dalam proses pembangunan. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembagunan Daerah telah terbentuk tim PUG yang terdiri dari FPG (*Focal Point*

---

[61] https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl988/istilah/ : acces 22/02/2020 122.45 WIB - Istilah Jo artinya *juncto* atau bertalian dengan, berhubungan dengan...

[62] Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan Nasional
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Surat Edaran Tahun 2013 tentang Startegi Nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gender) dan PokJa (Kelompok Kerja). FPG merupakan bagian dari aparatur SKPD yang memiliki kemampuan dalam melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing. Sedangkan PokJa PUG merupakan forum konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi atau lembaga daerah. Anggota FPG tersusun atas pejabat dan/atau staf SKPD yang membidangi tugas pemeberdayaan perempuan dan bidang lainnya melalui penetapan Kepala SKPD. Sedangkan PokJa PUG beranggotakan seluruh kepala atau pimpinan SKPD melalui keputusan Bupati.[63]

Gambar 4.4

Struktur Kelompok Kerja PUG dan FPG

Struktur Kelompok Kerja PUG :

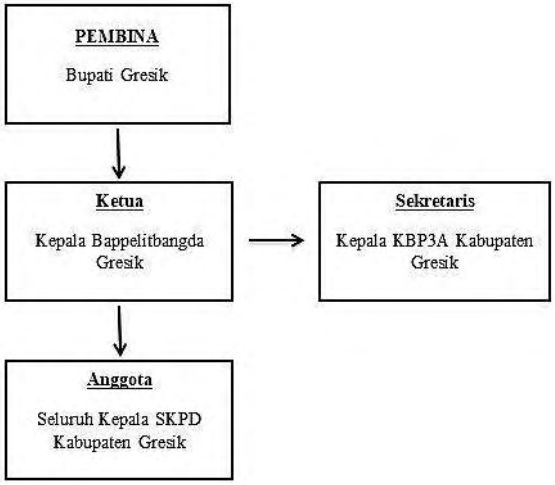

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

[63] Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur *Focal Point Gender* :

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

Di Gresik, Peraturan daerah yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan sudah dilakukan melalui pembentukkan FPG dan Pokja PUG berdasarkan regulasi yang telah terbentuk. Kemudian, di tahun 2018 struktur FPG dan PokJa PUG lebih di intensifkan. FPG dipegang oleh pejabat eselon 3 dan 4 dengan sekretaris dinas sebagai koordinator. Sedangkan PokJa PUG telah melibatkan lembaga masyarakat, perguruan tinggi, perusahaan dan sebagainya. Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 362/642/HK/437.12/2018 adalah sebagai berikut :[64]

[64] Keputusan Bupati Nomor 362/642/HK/437.12/2018 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengarah I	**:** Bupati Gresik
Pengarah II	**:** Wakil Bupati Gresik
Pengarah III	**:** Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
Pengarah IV	**:** Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
Ketua	**:** Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
Wakil Ketua	**:** Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
Anggota	**:** Pokja I, Pokja II, Pokja III, Pokja IV yang terdiri dari unsur Pemerintahan, swasta dan lembaga atau organisasi masyarakat.

Di dalam 7 prasyarat PUG, terdapat komitmen Pemerintah Daerah dalam membentuk sebuah Peraturan Daerah yang mengintegrasikan perspektif gender dalam proses pembangunan. Kabupaten Gresik telah mengundangkan Peraturan Daerahnya mengenai pelaksanaan PUG atau *Gender Mainstreaming* dalam alur mekanisme pembangunan yang kemudian dapat menjadi bagian dari tolak ukur untuk melihat kesungguhan Pemerintah Daerah mengatasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketimpangan gender. Selain itu, pembentukan FPG dan Pokja PUG melalui SK Bupati juga termasuk dalam indikator terlaksananya pengarusutamaan gender di daerah. Tahun 2018, Pemerintah Daerah membuktikan komitmen berkelanjutannya dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk tergabung dalam Pokja PUG yang sebelumnya hanya melibatkan Kepala-kepala OPD saja. Sehingga, pelibatan unsur-unsur masyarakat ini dapat mengintervensi pemantauan program agar tepat sasaran.

Pembentukan Pokja PUG dan FPG merupakan prasayat PUG dalam hal struktur dan mekanisme Pemerintah Daerah dalam mendukung implementasi PUG. Sehingga isu mengenai gender tidak hanya berfokus pada satu atau dua OPD saja karena dengan adanya Pokja PUG dan FPG peluang untuk mendorong setiap OPD memperhatikan isu terkait persoalan gender dalam pembangunan semakin besar. Fasilitator PUG di Gresik berupa FPG dan Pokja masih berjalan lambat karena beberapa faktor seperti pemahaman yang bias gender, mutasi pegawai yang telah berspektif gender, sosialisasi yang kurang intensif dan disposisi pimpinan pada pegawai yang hanya menggugurkan kewajiban saja. Sehingga PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) yang seharusnya berjalan karena dukungan ketersediaan Pokja dan FPG menjadi terhambat. Seperti yang dikatakan oleh Soeraningsih selaku Kasub bidang Pelayanan Keluarga Berencana :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "*Kemarin kita juga sudah mengusulkan untuk pelatihan PUG atau perspektif gender bagi seluruh pegawai pemda karena sampai saat ini, hambatannya terletak pada mereka yang hanya menggugurkan kewajiban yaitu datang saja tanpa mengetahui dia datang untuk apa.*" [65]

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Gresik khususnya yang memiliki fokus mengenai pemberdayaan perempuan dan anak tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 bab IV. Disebutkan bahwa PUG di Kabupaten Gresik memiliki kendala dalam beberapa hal antara lain dari segi internal Pemerintah Daerah dimana pemahaman sumber daya manusia di tingkat FPG dan Pokja PUG masih sangat lemah, belum tersedianya sistem informasi dan data terpilah gender, belum tersedianya indikator pembangunan yang berkelanjutan dan Sistem Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan dari segi eksternal Pemerintah Daerah datang dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendorong kesadaran gender serta tingginya jumlah kekerasan pada perempuan dan anak yang masih terjadi.[66]

Selain beberapa isu yang telah disebutkan di dalam RPJMD tahun 2016-2021, isu mengenai perempuan dan pembangunan juga dapat dilihat sebagai berikut :

---

[65] Soeraningsih Kasub bidang Pelayanan Keluarga Berencana Kabupaten Gresik, hasil wawancara pada 29 Januari 2020

[66] RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.6

Pembangunan Berbasis Gender Tahun 2017-2018

IPM	Aspek	2017			2018
		%			
		L	P	L	P
Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,93	13,70	13,94	13,71
	Rata-Rata Lama Sekolah	9,49	8,44	9,50	8,50

IDG	Aspek	2017	2018
Politik	Keterlibatan Perempuan Di Parlemen	12,00	14,00
	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	48,40	45,70

IPG / IDG	Aspek	2017		2018	
		%			
		L	P	L	P
Ekonomi	Pengeluaran Per Kapita	18.825	9.905	19.465	10.228
	Pendapatan Kerja Perempuan	P = 31,42		P = 31,45	

Sumber : Pembangunan Berbasis Gender Nasional 2018 dan 2019

Tabel 4.7

Laporan Dinas Keshatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2018

	Aspek	2017	2018
		/100.000	
Kesehatan	AKI (Angka Kematian Ibu)	91,72	96,64
	AKB (Angka Kematian Bayi)	5,26	4,06

Sumber : Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2015-2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Angka kematian ibu di Kabupaten Gresik di dominasi oleh tiga penyebab utama yaitu eklampsia (kejang pada ibu hamil), HPP (Hemorrhagic Postpartum) atau pendarahan setelah melahirkan dan penyakit jantung. Sedangkan angka kematian bayi disebabkan oleh asfiksia (gangguan penyaringan oksigen), BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) dan kelainan kongenital (cacat sejak lahir).

Tabel 4.8

Keterlibatan Perempuan Dalam Posisi Strategis dan DPRD

Golongan	2016		2017	
	L	P	L	P
I	137	23	110	22
II	1098	864	999	805
III	1688	2228	1428	1973
IV	1478	1698	1214	1510
Total	**4401**	**4813**	**3751**	**4310**

Sumber : Gresik Dalam Angka 2017 dan 2018

Jumlah Anggota Dewan					
2009-2014		2014-2019		2019-2024	
L	P	L	P	L	P
42	8	44	6	43	7

Sumber : kpu-gresikkab.go.id

Pengarusutamaan gender di Kabupaten Gresik menjadi salah satu strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahun 2016-2021. Terdapat 4 misi yang diemban Pemerintah Daerah dengan 8 IKU (Indikator Kinerja Utama) di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satunya menyentuh pada persoalan IPG (Indeks Pembangunan Gender). Poin kinerja Pemerintah Daerah yang membahas mengenai IPG terdapat pada misi keempat dari RPJMD yang menyatakan bahwa kapasitas potensi yang dimiliki oleh masyarakat akan ditingkatkan melalui pendistribusian bantuan pelayanan kesehatan, penciptaan komitmen pemberian edukasi yang kontinu dan terpenuhinya basis kepentingan lainnya. Berikut penjelasan yang tercantum dalam misi keempat RPJMD tahun 2016-2021 disusul dengan beberapa prestasi yang diraih Kabupaten Gresik berkaitan dengan perempuan dan anak : [67]

[67] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.9 RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2015-2021					
Misi Ke-4 Meningkatnya kualitas hidup melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.					
Tujuan	**Indikator Kinerja Daerah**	**Definisi Operasional**	**Sasaran**	**Arah Kebijakan**	**Strategi**
Tujuan 2 Menghadirkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG).	Indeks yang berfungsi untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan	Mewujudkan keberdayaan perempuan yang mandiri dalam pembangunan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya perlindungan perempuan dan anak serta advokasi terhadap pelbagai upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak didukung upaya preventif dan promotif berbasis pemberdayaan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan gender.	tumbuh kembang dan kelangsungan hidup yang berkualitas.	Peningkatan akses anak terhadap layanan berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup melalui akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran, pembangunan lingkungan ramah anak dalam tataran sekolah hingga daerah, ketersediaan layanan PAUD yang berkualitas dan filter informasi layak anak dalam rangka menuju kabupaten layak anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				Sinergitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan.	Integrasi pengarusutamaan gender dalam penguatan kerjasama lintas dalam tataran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
					Meletakkan kesetaraan gender sebagai perspektif *society enabling & empowering* maupun kaidah penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif.

Sumber : RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.10

Prestasi Kabupaten Gresik Terkait Perempuan

Prestasi Kabupaten Gresik yang di raih oleh dinas KBP3A :

Tahun	Prestasi	Tingkatan	Bentuk Penghargaan
2016	Anugerah Eka Praya Ketegori Madya	Nasional	Piagam
2017	Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Kategori PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat)	Nasional	Piala dan Uang Pembinaan
	KLA (Kabupaten Layak Anak)	Nasional	Piagam dan Trophy
	Dafa Award KAG (2017)	Nasional	Piagam dan Trophy
2018	Anugerah Parahita Eka Praya (APE) Kategori Utama	Nasional	Piagam
	Sekolah Perempuan (SEKOPER) *Special Category : Region in an Leading Profile on Inclusive Development*	Provinsi	Piagam
	Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama	Nasional	Piagam

Sumber : https://gresik.go.id/profil/penghargaan (acces : 24/03/2020 05.46 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi kebijakan, yang merupakan salah satu prasayarat berjalannya PUG, Kabupaten Gresik telah mengintegrasikan persoalan gender dalam dokumen RPJMD tahun 2016-2021. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam misi yang diemban Pemerintah Daerah, namun persoalan gender telah disinggung dalam bentuk Indikator Kinerja Utama yang kemudian diformulasikan ke dalam bentuk sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Melalui RPJMD inilah kominten Pemerintah dalam mengarusutamakan gender dalam pembangunan dapat terefleksikan. Selain itu, beberapa prestasi terkait Pengarusutamaan gender di Kabupaten Gresik yang dipertahankan dari tahun ke tahun merupakan wujud kesungguhan Pemerintah dalam melakukan inovasi-inovasi terkait PUG.

Prasayarat pendukung PUG lainnya terletak pada sistem informasi dan data terpilah gender. Kabupaten Gresik belum memiliki poin tersebut sebagai indikator dalam melihat kelembagaan PUG di internal Pemerintah Daerah. Di tahun 2019, baru dilakukan sosialisasi terkait data terpilah gender dan anak. Namun, masing-masing OPD mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi berbagai data apa yang harus dimasukkan. Sehingga sampai saat ini, data terpilah gender di Kabupaten Gresik belum tersedia. Baru di tahun 2020 ini, Bappeda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sub bidang kesejahteraan rakyat menjalin relasi dengan LPPM Brawijaya untuk proses pengadaanya di bulan juli mendatang.[68]

Kondisi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gresik juga dapat dilihat melalui perkembangan IPM, IPG dan IDG setiap tahun yang belum menunjukkan besarnya angka mendekati 100, sebagai berikut :[69]

Tabel 4.11

Pembangunan Berbasis Gender Tahun 2017-2018

	2017	**2018**
IPM	74,84	75,28
IPG	89,57	89,72
IDG	63,35	65,33

Sumber : Pembangunan Berbasis Gender Nasional 2018 dan 2019

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa angka pembangunan manusia maupun gender masih jauh dari angka 100, artinya kedudukan yang dialami perempuan masih pada status lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki baik dari segi keterlibatan maupun perolehan manfaat pembangunan. IPM memandang capaian pembangunan yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan, sedangkan IPG memandang kesenjangan capaian pembangunan yang diperoleh laki-laki dan perempuan. IPG dengan nilai 100 menandakan tidak ada kesenjangan, sedangkan IPG dibawah 100 menandakan

[68] Naily Itqiana Subbidang Kesejahteraan Rakyta Bappeda Kabupaten Gresik, hasil wawancara 24 Februari 2020

[69] Kerjasama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2019*, hlm 99-153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesenjangan yang dialami oleh perempuan. Begitu sebaliknya, IPG diatas 100 berarti kesenjangan dialami oleh laki-laki. Selisih angka IPG yang memiliki jarak tidak jauh dari nilai 100 artinya manfaat dari pembangunan mampu mendekati keseimbangan yang dirasakan baik oleh laki-laki maupun perempuan. IDG melihat sejauh mana keaktifan perempuan dalam bidang politik (keterlibatan perempuan di parlemen), pengambilan keputusan (posisi strategis seperti eselon) dan ekonomi (sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja).[70] IDG menjadi satu dari sekian indikator yang dinilai sebagai ruang bagi perempuan untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Angka IPG di Kabupaten Gresik masih menunjukkan adanya kesenjangan yang dialami oleh perempuan. Secara jasmani, perempuan memiliki pasokan kondisi genetik yang memiliki implikasi harapan hidup lebih lama dibandingkan dengan laki-laki.[71] Namun, potensi hidup lebih panjang tidak akan berjalan optimal apabila indikator dari pendidikan masih rendah, disusul dengan ruang perekonomian yang masih didominasi oleh laki-laki. Jika pencapaian pembangunan dilihat dari beberapa indikator IPG, hal ini berbanding lurus dengan angka IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) yang juga menunjukkan rendahnya keaktifan perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Padahal sejatinya, indikator IDG dapat menjadi ruang untuk perempuan dalam melibatkan diri di

[70] Iva Hasanah ketua KPS2K, hasil wawancara pada 23 Januari 2020
[71] Kerjasama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018*, hlm 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap alur perencanaan dan penyusunan *public policy* untuk memperkecil peluang terciptanya regulasi-regulasi yang bias gender. Namun, selisih antara IPG dan IDG belum dikatakan mencapai posisi ideal dimana angka IPG sama besarnya dengan IDG. Artinya, pembangunan gender yang tinggi seharusnya diikuti dengan pemberdayaan gender yang tinggi pula.[72]

Pemberdayaan gender kemudian akan berdampak pada kesadaran masyarakat dalam mendrong pengarusutamaan gender khususnya dalam proses perancangan pembangunan di tingkat regional. Sebagian besar pelaksanaan agenda pembangunan yang direfleksikan dalam sebiah forum perencanaan atau biasa disebut dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) hanya terikat pada usulan dalam bentuk fisik, prosesnya yang kurang partisipatif, pembahasan usulan yang kurang mendalam bahkan seringkali hanya sebagai formalitas. Kelompok marginal khususnya perempuan juga kurang terlibat dalam proses perencanaan yang seringkali didominasi oleh para elit perempuan di setiap jenjangnya mulai dari desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. Rendahnya kehadiran perempuan di setiap proses musrenbang juga dapat disebabkan karena beberapa alasan seperti tidak diundang, diundang namun tidak hadir atau tidak diperbolehkan, tidak berani berbicara, tidak mengetahui apa yang ingin disampaikan, tidak tergabung dalam

[72] Ibid,. hlm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi, tidak menuntut haknya hingga tidak diketahui keberadaanya.[73] Seperti yang diungkapkan oleh anggota KBP3A di subbidang pelayanan Keluarga Berencana, bu Soeraningsih :

> "*Kehadiran perempuan dalam musrenbang hanya sekedar hadir. Malah ada desa yang yang sebelum musrenbang desa, presensi kehadiran perempuan itu di kelilingno disek (di kelilingkan terlebih dahulu) di setiap rumah. Jadi pada hari H Musrenbang desa itu dilaksanakan, kehadiran perempuan tidak dipermasalahan dalam proses perencanaan pembangunan, yang penting tertera daftar hadirnya.*"[74]

Selain dari kalangan perempuan, pengarusutamaan gender di Kabupaten Gresik menjadi tersendat akibat faktor internal Pemerintah Daerah khususnya di lingkup OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) terkait dengan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender). Terhambatnya PPRG merupakan implikasi dari maraknya mutasi pegawai, kurangnya penguatan kapasitas melalui sosialisasi tentang PPRG, tinnginya komitmen untuk sekedar menggugurkan kewajiban dan pemahaman yang masih bias gender. Disamping permasalahan PPRG yang terhambat, evaluasi pelaksanaan PUG juga hanya sekedar pengisian dan pengiriman format tanpa diikuti komitmen yang berkelanjutan.[75]

---

[73] Disampaikan dalam materi Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2020 oleh Suti'ah LKPP Jawa Timur (13 Februaru 2020)
[74] Soeraningsih Kasub bidang Pelayanan Keluarga Berencana Kabupaten Gresik, hasil wawancara pada 29 Januari 2020
[75] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber daya manusia yang memadai dalam memahami pengarusutamaan gender terletak pada kinerja Pemerintah Daerah berserta dengan jajarannya. Jika komitmen Pemerintah Daerah telah dilakukan melalui peluncuran Peraturan Daerah dan Surat Keputusan terkait Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, tantangan yang kemudian datang bersumber dari keseriusan setiap personil perangkat daerah yang masih mengalami kendala. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat pemahaman gender bagi pegawai Pemerintah Daerah. Upaya yang dilakukan sampai sat ini masih berada pada tahap penguatan sosialisasi dan pelatihan terkait pemahaman perspektif gender. Hal ini kemudian berdampak pada terhambatnya pemahaman mengenai penyusunan PPRG. Sebagian besar OPD mengalami kesulitan dalam penyusunan analisis PPRG melalui 3 alat analisis yaitu GAP, GBS dan TOR. Seperti yang dikataan oleh Naily Itqiana Subbidang Kesejahteraan Rakyat :

> "*... di dalam GAP ini ada sembilang langkah penyusunan. Di langkah pertama terdapat data pembuka wawasan. Mulai Tahun 2015, kita telah membimtek teman-teman OPD terkait penyusunan PPRG. Yang ditemukan kemudian adalah kesulitan mereka dalam menemukan data pembuka wawasan itu tadi. Karena masing-masing OPD masih belum mempunyai data terpilah gender..*"[76]

[76] Naily Itqiana Subbidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kabupaten Gresik, hasil wawancara 24 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, koordinasi antar OPD terlihat kurang selaras. Dalam hal ini misalnya pembiayaan musrenbang perempuan dan program dalam mengarusutamaan kelompok rentan (disabilitas) di proses pembangunan. Pembiayaan musrenbang perempuan masih dibebankan pada Dinas KBP3A. Idealnya, jika musrenbang reguler termasuk dalam program Bappeda maka musrenbang perempuan memiliki posisi yang sama. Hal ini juga terjadi di tingkat desa, seperti yang dikatakan oleh Bu Lilik *Leader* Sekolah Perempuan Wringinanom Gresik :

> "*contoh pengalaman saya di musrenbang perempuan kemarin di tingkat desa. Kita kan melihat di peraturan bupati dan UU Desa yang sebenarnya ada musyawarah rencana pembangunan yang mencantumkan dana untuk musyawarah dusun (non-reguler) dan musyawarah reguler, ternyata musrenbang perempuan masuk dalam musyawarah non-reguler. Lalu kami menanyakan apakah acara musrenbang perempuan bisa memakai dana dari desa seperti musdus dan musdes ?. lalu dijawab tidak bisa, harus memakai dana desa untuk sekolah perempuan itu sendiri. akhirnya ya tidak apa-apa kan ini masih awal. Kemungkinan pemerintah Desa belum mengerti, BPD juga belum mengerti. Mungkin bisa di tahun depan, sementara pakai Dana Desa sekolah perempuan dulu".*[77]

Mengenai musrenbang inklusi, dinas KBP3A menagih janji Bappeda dalam menginisiasi adanya ruang pembangunan khusus kelompok inklusi (disablitas, perempuan, anak, dsb). Namun, jawaban dari Bappeda cenderung normatif :

[77] Lilik *Leader* Sekolah Perempuan Wringinanom Gresik, hasil wawancara 1 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "„*jadi sebenarnya ketika kita sudah meluncurkan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten itu kita sudah mengarusutamakan kehadiran perempuan, anak dan disabilitas. Kita sudah laksanakan di 2020 tetapi masalahnya itu apakah kita perlu forum khusus karena di PTO kami sudah mengarusutamakan musrenbang di tiap tingkat. Kalau KBP3A perlu forum khusus, monggo diajukan saja. Kita sudah siap anggarannya*"[78]

Poin terakhir mengenai prasayarat pelembagaan PUG adalah partisipasi lembaga masyarakat dalam mendukung PUG. Hal tersebut ditunjukkan melalui pengadaan MoU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dengan LSM KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan) di dalam lingkaran kesepakatan terkait pemberdayaan perempuan melalui program *gender watch*. Kesepakatan yang telah dilakukan memiliki orientasi dalam memberdayakan dan mengangkat kapasitas perempuan yang bertempat tinggal di Gresik khususnya perempuan yang masuk dalam kategori miskin dan marjinal atau dengan keadaan ekonomi pra-sejahtera. Program yang ditawarkan berkaitan dengan pendidikan dan kepemimpinan perempuan. Di ranah pendidikan, dibentuk sebuah sekolah perempuan sedangkan di ranah kepemimpinan di inisiasi adanya musrenbang perempuan. MoU ini secara tidak langsung merupakan strategi Pemerintah Daerah dalam mengkampanyekan

[78] Rian Pramana Suwanda subbagian program dan pelaporan Bappeda Kabupaten Gresik, hasil wawancara pada 21 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urgensi PUG di bidang edukasi dan kontribusi perempuan di sektor publik. Secara singkat, pelembagaan PUG di Kabupaten Gresik dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.12

Kelembagaan PUG Kabupaten Gresik

NO	ASPEK	KETERANGAN
1.	Komitmen Pemerintah Daerah	• Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan. • Diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas terkait pembentukan FPG • Diterbitkannya Surat Keputusan Bupati terkait pembentukan Pokja PUG
2.	Kebijakan	RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2016-2021.
3.	Kelembagaan	• Pokja PUG yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. • Sekolah Perempuan sebagai tim teknis pelaksanaan program pembangunan.
4.	SDM dan SDA	SDM internal Pemerintah Daerah yang masih bias gender mengakibatkan kesulitasn dalam menyusun anggaran yang responsif gender (SDA).
5.	Sistem Informasi	Belum tersedianya sistem informasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	dan Data Terpilah Gender	dan data terpilah gender. Hanya pada beberapa dinas saja seperti dinas pendidikan dan dinas KBP3A.
6.	Analisa PPRG	Analisa PPRG pada metode GAP (*Gender Analaysis Pathway*) di tahap pertama masih terapat kendala dalam memahami data pembuka wawasan.
7.	Partisipasi lembaga masyarakat dalam menyelesaikan isu-isu terkait gender	MoU Pemerintah Daerah dengan KPS2K dalam mengembangkan inovasi Sekolah Perempuan dan inisiasi Musrenbang Perempuan.

Program bersama LSM KPS2K ini seharusnya dapat mempermudah keseriusan baik dari sisi Pemerintah Daerah beserta jajaranya maupun masyarakat khususnya kelompok perempuan sebagai penerima manfaat pembangunan untuk turut serta berkntribusi dalam proses pembangunan pula. Dengan berjalannya program kerjasama tersebut, setidaknya dapat meringankan kinerja personil perangkat daerah dalam mengelompokkan isu dan anggaran terkait Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gresik. Melalui sekolah perempuan, terciptalah perwakilan perempuan yang selama ini tidak berani atau tidak memiliki akses untuk bersuara di publik atas permasalahan yang menimpa dirinya. Dengan begitu, pemfokusan isu akan dengan mudah tergambarkan melalui perwakilan tersebut untuk kemudian diserahkan pada perangkat daerah untuk dibentuk sebuah program dan anggaran yang responsif gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kontribusi Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2019 Dalam Mengakomodir Pembangunan Bagi Perempuan

Musrenbang perempuan di Kabupaten Gresik merupakan salah satu inisiasi dari KPS2K sebagai upaya *affirmative action* untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan (musrenbang reguler) yang selama ini dinilai belum mampu melakukan percepatan PUG, berbagai usulan yang belum terakomodir dan prosesnya yang kurang partisipatif. Musrenbang perempuan menyediakan ruang khusus untuk perempuan dalam menyampaikan usulan yang variatif, secara kuantitaif juga lebih banyak menghadirkan berbagai unsur dan secara kualitatif pula dinilai mampu merepresentasikan persoalan-persoalan perempuan yang tengah dialami, khususnya bagi perempuan miskin dan marjinal. Kelompok perempuan yang hadir dalam musrenbang perempuan dinilai telah representaif bagi perempuan yang selama ini memang secara akses tidak ada dalam proses-proses pengambilan kebijakan, tidak pernah diundang dan tidak pernah didengar sehingga *feedback* yang seharusnya diterima justru tidak pernah dirasakan secara langsung.

> "*Karena pada saat musrenbang reguler itu kan seharusnya ada dialog, tapi yang namanya musrenbang itu tidak pernah terjadi proses musyawarah, yang ada itu hanya penetapan-penetapan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja. Nah itu yang kemudian penetapan itu dari usulan siapa ?" [79]

Musrenbang reguler diibaratkan sebagai saluran yang buntu karena selama ini, Pemerintah hanya *mengeneral* program saja tanpa memfokuskan sasarannya. Kekhususan ini akan dihapus apabila saluran yang buntu dinilai sudah berjalan dengan baik. Secara metodologi, musrenbang perempuan berbeda dengan musrenbang reguler dimana proses dialog memang benar dilakukan. Musrenbang perempuan ini erat kaitannya dengan Sekolah Perempuan (Sekoper). Tanpa hadirnya sekolah perempuan, inisiasi musrenbang perempuan dirasa sulit untuk dilakukan karena syarat dari dilaksanakannya musrenbang perempuan adalah mampu menghadirkan perempuan-perempuan yang berkapasitas dan telah memiliki perspektif tentang gender. Terkait dengan gugus tugas PUG di tingkat Pemerintah Daerah, tupoksi Bappeda sebagai penyelenggara musrenbang berhasil dijalankan melalui kerjasama dengan dinas KBP3A sebagai *leading sector* nya. Sedangkan di tingkat desa, gugus tugas PUG dijalankan oleh Sekolah perempuan. Sekolah perempuan menjadi instrumen analisis dengan KPS2K sebagai *sterril commite*.[80]

Tahun 2014, KPSK mengadakan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Gresik berkaitan dengan program *gender watch* yang telah berjalan sejak tahun 2013. Program *gender watch* merupakan suatu

[79] Iva Hasanah Ketua KPS2K, hasil wawancara pada 16 Januari 2020
[80] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya dalam memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan di Gresik. Proram ini memfokuskan sasaran kepada perempuan-perempuan yang berada di bawah garis kemiskinan atau dapat dikatakan sebagai kelompok pra-sejahterah (*grassroot*) yang harusnya menjadi penerima program-program perlindungan sosial dari Pemerintah Daerah. Di dalam program *gender watch*, terdapat dua strategi besar yaitu advokasi dan *capacity building*. Upaya advokasi dilakukan untuk mendorong mereka yang termasuk dalam *decision maker* baik di pemerintah maupun non-pemerintah mampu mempercepat penghapusan kemiskinan terhadap perempuan. Sedangkan upaya *capacity building* lebih berkonsentrasi dalam membangun dan memperkuat gerakan perempuan yang ada di kelompok miskin sebagai penerima manfaat dari sebuah kebijakan. Hasil dari upauya memperkuat gerakan tersebut direfleksikan dalam sekolah perempuan. Kemudian di tahun 2016 KPS2K memasukkan beberapa program untuk sekolah perempuan ke dalam RPJMD. Salah satu programnya adalah menginisiasi musrenbang perempuan yang ada di Gresik. Namun, musrenbang perempuan bariu terealkisasi di tahun 2018 sebagai usulan di tahun 2017.[81]

Inisiasi musrenbang perempuan di awal proses pengusulannya mengalami beberapa tantangan baik dari pihak OPD Kabupaten Gresik, dari pihak di luar Sekolah Perempuan maupun yang termasuk

[81] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam keanggotaan Sekolah Perempuan. Penolakan mengenai anggaran dari setiap OPD merupakan tantangan awal yang dirasakan oleh KPS2K sebagai penginisiasi musrenbang perempuan. Namun, penolakan tersebut dapat diterima seiring dengan tawaran-tawaran yang akan diperoleh setelah diadakannya musrenbang perempuan misalnya dalam hal memetakan dan menentukan sasaran program yang dirasa akan jauh lebih mudah. Diterimanya musrenbang perempuan juga didorong oleh inisiasi dinas KBP3A yang mendesak agar musrenbang perempuan harus dilakukan. Selain itu, tantangan lain datang dari peserta musrenbang di luar Sekolah Perempuan yang dipandang masih belum memiliki kapasitas terkait perspektif pentingnya musrenbang perempuan harus dilakukan, pemetaan isu yang berfokus pada perempuan dan cara menjadi perwakilan dalam musrenbang perempuan. Sedangkan tantangan dari anggota sekolah perempuan cenderung mengkhawatirkan persoalan kaderisasi karena di setiap tahunnya, peserta yang hadir dalam musrenbang perempuan seringkali berbeda.[82]

Anggota sekolah perempuan menjadi penggerak atau *driven* dari PUG di tingkat desa. Setelah dilakukannya pemahaman engenai konsep seks dan gender, anggota sekolah perempuan membuat kegiatan untuk mengetahui jenis permasalahan yang dialami di desa yang di tempat tinggali. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah

[82] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan membuat peta partisipatif. Peta partisipatif ini yang kemudian memiliki nilai dalam memandang persoalan yang dialami di desa untuk secara terus menerus diusulkan di dalam musrenbang perempuan apabila belum terealisasi. Metode pembuatan peta partisipatif dilakukan selama satu minggu atau tujuh hari lamanya.[83]

Hari pertama, anggota sekolah perempuan membuat *transect* untuk mencari tahu batas-batas desa. Hari kedua, kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan informan yang telah diundang dan dinilai sudah mewakili semua unsur seperti perwakilan dari perangkat desa, pentolan masyarakat, figur masyarakat yang agamis, guru serta bidan. Dari unsur-unsur yang diundang, informan terpenting ada di anggota sekolah perempuan penerima manfaat yang sebagian besar adalah perempuan miskin. Hari ketiga, setelah informasi terkumpul, selanjutnya melakukan rangking sosial ekonomi melalui indikator penghasilan suami, penghasilan istri dan menu makanan setiap hari. Kategori rangking sosial ekonomi terdiri dari sangat miskin, miskin, sedang, kaya dan sangat kaya. Di hari keempat, anggota sekolah perempuan melakukan pengamatan aktivitas sehari-hari melalui kegiatan yang dilakukan perempuan dan laki-laki untuk menemukan alasan mengapa perempuan tidak bisa keluar rumah. Ternyata, kegiatan yang dilakukan oleh permepuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

[83] Lilik *Leader* Sekolah Perempuan Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, hasil wawancara pada 1 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di hari kelima, membuat diagram venn untuk mengumpulkan jumlah organisasi yang ada di desa. Ditemukan bahwa PKK merupakan organisasi masyarakat yang berdekatan dengan kantor desa baik dari segi lokasi maupun aspek elitisnya. Namun, PKK tidak memiliki orientasi untuk membantu masyarakat miskin. Sedangkan sekolah perempuan meskipun "tidak berdekatan" dengan kantor desa, namun sasaran utamanya adalah masyarakat miskin. Sehingga perlu adanya upaya untuk mendekatkan Pemerintah desa dengan sekolah perempuan. Hari keenam, anggota sekolah perempuan mencari tahu mengenai kalender musim yang dapat menimbulkan kemiskinan pada masyarakat misalnya musim panen, musim tanam, musim hajatan, musim hama, musim sedekah bumi, dan sebagainya. Terakhir, adalah pembuatan peta partisipatif. Jadi, acuan mengenai usulan terkait masalah perempuan dapat dilihat melalui peta partisipatif.

Peta partisipatif merupakan acuan dalam merefleksikan usulan berdasarkan permasalahan yang telah di kumpulkan dari tingkat desa. Usulan ini kemudian diajukan dalam musrenbang reguler. Namun, selama ini usulan yang diajukan selalu terhapus dan pada akhirnya tidak terangkat sampai pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Kabupaten. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Lilik *leader* Sekolah Perempuan :

> "*..saat kami ikut musrenbang desa, kami usulkan tentang ambulance desa. Kemudian tentang sekolah perempuan, pendidikan bagi perempuan yang putus sekolah. Kemudian kejar paket A B C dan akhirnya Alhamdulillah diterima di desa.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ikut, diundang lagi di musrenbang kecamatan ternyata dari 10 usulan kami tidak ada yang terealisasi...."[84]

Melihat hal tersebut, timbul inisiatif dari pihak KPS2K untuk melakukan upaya *shortcut* dalam menyalurkan usulan kelompok perempuan yang tidak terealisasi. Upaya tersebut merupakan salah satu strategi PUG dalam membawa kebutuhan perempuan yang tidak memiliki ruang untuk berbicara karena pemahaman yang masih bias gender di tingkat desa dan kecamatan. Usulan yang sebelumnya tidak diterima di tingkat kecamatan kemudian langsung dibawa di tingkat kabupaten melalui Musrenbang reguler tahun 2015. Harapannya, di Kabupaten usulan perempuan miskin dapat leluasa di suarakan karena didukung oleh beberapa faktor seperti kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender mulai di internal Pemerintah sendiri serta pembagian fokus permasalahan di setiap SKPD. Namun, pada kenyataanya usulan tersebut tidak langsung menuai tanggapan positif seperti yang diakatakan oleh Lilik anggota sekolah perempuan yang menjadi peserta Musrenbang reguler pada saat itu :

"*saya waktu angkat tangan dibatasi. Kan dibagi menjadi 4 kluster yaitu tentang pendidikan, kesehatan, kepemimpinan perempuan dan ekonomi. Pada saat itu saya mengambil di kluster kepemimpinan perempuan nah waktu itu saya angkat tangan di kesehatan, kemudian saya angkat tangan lagi di*

[84] Lilik *Leader* Sekolah Perempuan Wringinanom Gresik, hasil wawancara 1 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan. Saya malah dikatain ini kecil-kecil penjalukane wakeh, gelani. Saya malah dimarahin seperti itu. Akhirnya usulan saya di pendidikan, langsung saya kasihkan ke dinas pendidikan karena waktu itu saya sudah dibatasi untuk angkat tangan."[85]

Berbagai tantangan dan hambatan yang dialami oleh kelompok perempuan miskin dan marjinal dalam menyuarakan usulannya terkait pembangunan pada akhirnya berbuah manis. Mulai tahun 2018, usulan mengenai dilaksanakannya musrenbang perempuan sudah mulai berjalan. Pada tahun 2018, musrenbang perempuan diadakan bertempat di ruang Argo Lengis Pemerintah Kabupaten Gresik yang disemarakkan oleh 50 masyarakat berjenis kelamin perempuan sebagai konstituen dari unsur eksekutif, legisltaif, penegak atau paralegal hukum, organisasi masyarakat yamg berkaitan dengan perempuan (dharmawanita), pranata perempuan, NGO yang terkait dengan kepedulian terhadap perempuan, kader atau komunitas perempuan, figur perempuan yang agamis, tenaga ulung perempuan, seniman perempuan, PKK serta anggota dari SP (Sekolah Perempuan) bersama dengan lingkarang perempuan marjinal lainnya. Terdapat empat kluster penting yang dibahas antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kepemimpinan perempuan. Dalam musrenbang perempuan tahun 2018, terdapat 24 usulan di bidang ekonomi, 10 usulan di bidang kesehatan, 15 usulan di bidang pendidikan dan 7 usulan di bidang kepemimpinan perempuan. Total dari 56 usulan

[85] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, yang terealisasi di dalam Renja tahun 2019 setiap SKPD adalah sebanyak 10 usulan.[86]

Tahun 2019, musrenbang perempuan diadakan kembali untuk kedua kalinya. Berlokasi di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik. Mengusung tema "Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan Melalui Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik. Dihadiri oleh 165 peserta. Mendiskusikan persoalan perempuan melalui empat kluster yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kepemimpinan perempuan. Terdapat 71 usulan yang tersebar dalam 27 usulan di bidang pendidikan, 17 usulan di bidang kesehatan, 11 usulan di bidang ekonomi dan 16 usulan di bidang kepemimpinan perempuan. Dari 71 usulan musrenbang perempuan tahun 2019, sebanyak 12 usulan yang masuk dalam Rencana Kerja tahun 2020 di OPD terkait. Berikut daftar hadir berdasarkan kategori unsur dan usulan Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2019 :[87]

[86] Data hasil musrenbang perempuan diperoleh dari Dinas KBP3A yang masuk dalam Renja 2019
[87] Data hasil musrenbang perempuan diperoleh dari Dinas KBP3A yang masuk dalam Renja 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.13

Daftar Hadir Peserta Musrenbang Perempuan 2019

L = 4

P = 161

Tanggal : 08 Februari 2019

No.	Instansi		
1.	DPC F SP LEM – SPSI Gresik	17.	Universitas Muhammadiyah Gresik
2.	Forgmagam Gresik (Forum Umat Keagamaan)	18.	PC Muslimat
3.	PSG Qomaruddin	19.	SPAK Gresik (Saya Perempuan Anti Korupsi)
4.	Perwakilan dari kelurahan / desa	20.	ASBAG (Asosiasi Bank Sampah Gresik)
5.	KPG Gresik (Kursus Pendidikan Guru)	21.	PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia)
6.	PKBI Gresik (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)	22.	Klentheng Budha / Konghucu
7.	KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan)	23.	Forum PAUD Kabupaten Gresik
8.	WHDI (Wanita Hindhu Dharma Indonesia)	24.	KPPI Gresik (Kaukus Perempuan Politik Indonesia)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9.	WKRI (Wanita Katolik Republik Indonesia)	25.	Pattiro Gresik (Pusat Telaah dan Informasi Regional)
10.	Sekolah Perempuan	26.	PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia)
11.	PDA Kabupaten Gresik (Pimpinan Daerah Aisiyah)	27.	IBI (Ikatan Bidan Indonesia)
12.	PC Fatayat Gresik	28.	GOW Gresik (Gabungan Organisasi Wanita)
13.	Radar Gresik	29.	Faskom (Fasilitas Komputer)
14.	TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)	30.	Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
15.	RBM Giri Kedaton (Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat)	31.	Dinas KBP3A (Keluarga Brencama, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
16.	DWP Gresik		

Sumber : Hasil observasi peneliti, 26 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.14

Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2019

Sesi Presentasi Hasil Musyawarah Setiap Bidang

NO	USULAN
	Usulan yang masuk dalam Renja 2020
BIDANG PENDIDIKAN	
Presentator : Hudiya (Faskom)	
1	Kejar Paket A,B Gratis 100 % Ds. Sumbergede, Sooko, Wonorejo, Kesamben Kulon, Kedungsumber, Mondoluku, Sidomukti, Kramat, Dungus, Dooro, Ganggang-B.Panggang, perempuan miskin dan korban kekerasan, Brangkal, Desa Dukun Kembar Kecamatan Dukun (15 Desa yang ada 15 Sekolah Perempuan)
2	Kejar Paket C Gratis bagi masyarakat miskin : ds.sumber gede,mondoluku,sooko,kedungsumber,ganggang-b.panggang,brangkal, perempuan miskin dan korban kekerasan (15 Desa yang ada 15 Sekolah Perempuan)
3	Tersusunnya regulasi (Perda/Perbup) untuk menghapus perkawinan usia anak
4	Tersusunnya regulasi (Perda/Perbup) untuk mencegah kekerasan di sekolah (mengeluarkan anak dari sekolah karena sebab apapun)
5	Memperkuat regulasi untuk transportasi angkutan berat di jam berangkat dan pulang sekolah
6	Pengembangan sekolah ramah anak 100% di Gresik
7	Penyediaan ruang terbuka hijau bagi tempat bermain untuk anak
8	Memfasilitasi tempat penitipan anak korban kekerasan yg non-muslim
9	Membuat media promosi publikasi, advokasi, iklan layanan, edukasi yang dapat mencegah kekerasan terhadap anak
10	Meningkatkan kapasitas dan kuantitas *shadow* dan Guru pendamping inklusi di sekolah negeri tiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	tingkatan
11	Menginisiasi *daycare* di lingkungan Pemda Kabupten Gresik
12	Pelatihan SDM bagi pengelola *Daycare*
13	Pendidikan nitigasi disekolah sejak dini melalui sekolah formal dan non formal
14	Perpustakaan Perempuan disetiap desa
15	Adanya pendidikan IT khusus perempuan yg tidak sekolah
16	Pendidikan karakter untuk anak khususnya di desa-desa
17	Pendidikan karakter untuk tenaga pendidik di Kabupaten Gresik
18	Ada regulasi tentang sanksi bagi pembuang sampah sembarangan
19	Setiap dusun , desa adanya sekolah perempuan
20	Sekolah perempuan wringinanom minta difasilitasi kab.gresik
21	Penambahan sekolah inklusi untuk anak non muslim tingkat SD - SMA
22	Membangun rumah inklusi disetiap desa
23	bekerja sama dengan dinas terkait untuk melakukan Sosialisasi anti korupsi di sekolah-sekolah
24	Kenaikan gaji bagi Guru PAUD
25	Sosialisasi *managemant* PAUD dan pentingnya program *parenting*
26	Pendidikan keberagaman
27	Pendataan Ulang Lembaga PAUD
BIDANG KESEHATAN	
Fasilitator : Siska (Faskom)	
1	Penyediaan kendaraan shuttle dari Puskesmas seluruh Kecamatan ke RSUD Ibnu Sina bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan rujukan.
2	Memperkuat promosi pendidikan seksualitas: Melalui guru BK Melalui pertemuan dengan anak di sekolah Melalui pertemuan dengan anak di luar sekolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Melalui pertemuan dengan orangtua anak baik di sekolah maupaun di luar sekolah Pendidikan internet aman
3	Meningkatkan sosialisasi KIS serta peran masyarakat khususnya perempuan dalam melakukan pendataan ulang penerima manfaat.
4	Membuat sosialisasi JAMPERSAL
5	Pemantauan P4K, Dasolin dan Tabulin
6	Pengadaan pojok laktasi di ruang publik, Rumah sakit, Mal, kantor, perusahaan,
7	Kursus Calon Pengantin untuk mencegah peningkatan AKI AKB dan Stunting pada anak.
8	Soalisasi Pemberian Makanan Tambahan Pada Anak untuk Guru PAUD dan TK
9	Peningkatan Kesehatan Perempuan melalui Sosialisasi dan Pemerikasaan IVA Gratis bagi perempuan Miskin.
10	Surat Edaran himbauan untuk tidak menggunakan stereofoam sebagai kemasan makanan bagi penjual makanan
11	Sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2017 terkait pegelolaan sampah
12	Pemberian Nutrisi Tambahan bagi penderita TB yang Multi Drug Resistent
13	Sosialisasi pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) dan pemenuhan Gizi Anak Didik
14	Pengadaan alat ukur tinggi badan, berat badan dan lingkar kepala
15	Sosialisasi kepada masyarakat miskin terhadap pelayanan KIS PBI
16	Memberikan vitamin (Fe) kepada penderita anemia
17	Dinkes menyidiakan dana talangan untuk pembasmian nyamuk DBP (fogging)
BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI	
Fasilitator : Wiwik (GOW)	
1	Mengadakan BIMTEK Penguatan industri mikro/kecil (LEM SPSI, Ds. Kepolo Gundi, Ujung Pangkah, Ds. Dooro, Ds. Brangkal, Ds. Sidomukti, Ds. Keramat, Ds. Dungus, KPPI, Ds. Keramat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	inggil)
2	Pelatihan kewirausahaan dan pemasaran Online (Ds. Kepolo gundi, Aisyah, Ds. Sidomukti, RBM, GOW, KPTI, Keramat Inggil)
3	Pelatihan pengelolahan daur ulang sampah organik dan non organic (PKK Kabupaten, Ds. Dooro, Ds. Brangkal, Ds. Keramat Bungah, Ds. Dungus)
4	Pelatihan pengemasan dan pemasaran hasil produksi
5	Menyelenggarakan Bazar/Pameran (GOW)
6	Pertanian Organik untuk keluarga (Ds. Kramat Bungah, Aisyah)
7	Pengembangan pangan lokal dan Kreasi olahan pangan (PKK kabupaten)
8	Pengolahan Bank Sampah dan Problem Transportasi bank sampah yang mendesak (Sekolah Perempuan semua desa & ASBAG)
9	Menambah modal untuk usaha Mikro (PKK,GOW,Sekolah Perempuan, kecamatan,Aisyah)
10	Pelatihan livelihood perempuan
11	Pelatihan dan lomba membuat alat peraga edukatif (APE)
PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN	
Fasilitator : Jani'ah (PKK)	
1	Seminar Sehari tentang pengelolaan organisasi wanita
2	Pendidikan Politik Praktis bagi perempuan
3	Pendidikan Pengembangan Kepribadian dan Publik Speaking
4	Pendidikan ketahanan keluarga untuk mengurangi perceraian
5	Pelatihan Kepemimpinan Perempuan termasuk pendidikan politik
6	Pendidikan konseling pra nikah
7	Pendidikan kepemimpinan perempuan untuk Penguatan PATBM dan Sistem Perlindungan Anak secara umum
8	Pelatihan kesetaraan gender untuk lintas agama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	budaya dan keberagaman
9	Pendidikan Anti Korupsi melalui simulasi anti korupsi bagi lembaga pendidikan, organisasi perempuan dan lembaga lainnya.
10	Musrenbang Perempuan di Desa
11	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak
12	Sosialisasi atau pendidikan kepada perangkat desa tentang pentingnya Sekolah Perempuan
13	Kajian perkembangan gerakan dan permasalahan perempuan di Gresik
14	Penguatan Peran Organisasi sebagai Gerakan Perempuan dan sebagai kekuatan strategis masyarakat sipil madani, kegiatan pelatihan analilsa berbasis gender.
15	Pengembangan Pusat Data Pengembangan pemikiran isu perempuan dan anak di Kabupaten Gresik
16	Pelatihan peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD

Sumber : Hasil observasi peneliti. 29 Januari 2020

Berdasarkan hasil musrebang perempuan diatas, usulan yang belum terakomodir perlu dikemukakan kembali dalam musrenbang perempuan tahun depan. Apabila usulan tersebut tidak dimunculkam, maka pelaksanaannya juga akan terhambat. Beberapa usulan yang tidak terakomodir juga disebabkan karena kurang jelasnya maksud dari usulan sehingga sulit diterjemahkan oleh masing-masing OPD.[88]

Dalam pelaksanaan musrenbang perempuan, terjadi dinamika *the battle of program* yang terefleksikan dalam kapasitas dan

[88] Naily Itqiana Bappeda Subbidang Kesejahteraan Rakyat, hasil wawancara pada 24 Febaruari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perspektif yang datang dari peserta musrenbang maupun *decision maker* yang pada kenyataanya masih bias gender. Basis analisis yang digunakan dalam musrenbang perempuan adalah permasalahan-permasalahan yang dialami oleh perempuan. Namun, peserta musrenbang di luar keanggotan sekolah perempuan masih belum memahami berbagai permasalahan perempuan itu sendiri. Sehingga usulan-usulan yang diajukan belum dikatakan spesifik terkait dengan persoalan yang di alami oleh perempuan. Tantangannya kemudian terdapat pada prasyarat-prasayarat dalam menghadirkan keterwakilan dalam musrenbang perempuan, namun hal itu belum dilakukan mengingat kendala yang dialami oleh perempuan untuk mewakili dirinya sendiri. Sehingga, pembelajaran yang dapat diselipkan dalam musrenbang perempuan adalah dengan menyampaikan materi terkait dengan gender sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Iva Hasanah Ketua KPS2K :

> "*Jadi, kalau saya sih melihat dinamikanya berada di peserta yang baru mengikuti dan dia belum pernah mendapatkan kapasitas terhadap atau perspektif tentang gender sehingga dia tidak bisa memahami masalah perempuan itu apa. Berbeda dengan kelompok sekolah perempuan, mereka diberikan pembelajaran pertama mengenai proses penyadaran perempuan atas kesenjangan yang dialami. Di situlah ketemu bahwa oh ternyata saya itu bermasalah. Kalau musrenbang perempuan itu memang banyak fasilitasi, perdebatan-perdebatan dan itu juga keluar dari pemerintah yang datang di situ. Jadi banyak decision Maker itu yang bias gender. Mereka perempuan tetapi dia sendiri tidak memahami, akhirnya dia menyalahkan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan. Misalnya angka perceraian tinggi di Gresik, mereka menyalahkan perempuan karena perempuan dianggap berani padahal keberanian perempuan merupakan kemandirian mereka atas dirinya untuk memutuskan kondisi yang dialami."[89]

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa musrenbang perempuan merupakan strategi PUG dalam membuka akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang lebar terhadap perempuan yang selama ini kurang diperhatikan. Penjelasan sebagai berikut :

1. Akses, merupakan kapasitas dalam menggunakan sumberdaya melalui partisipasi yang aktif juga produktif baik dari aspek sosial, ekonomi dan politik di setiap proses pembangunan seperti penyajian bantuan jasa, pegawai dan mata pencaharian, warta atau infomasi dan kemaslahatan.

   Musrenbang perempuan membuka oportunitas yang luas untuk kelompok perempuan dibawah garis kemiskinan yang terperangkap dalam pekerjaan domestik. Dengan adanya strategi PUG melalui musrenbang perempuan ini, kebutuhan-kebutuhan perempuan yang selama ini belum terintervensi oleh Pemerintah daerah dengan mudah dapat terangkat ke permukaan. Berikut beberapa akses yang diperoleh dari musrenbang permepuan :

   a. Akses permepuan dalam memaparkan permasalahan yang dialami disusul dengan pengusulan program atas masalah

[89] Iva Hasanah Ketua KPS2K, hasil wawancara pada 16 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat dengan mudah dipertimbangkan sebagai program pembangunan daerah. Selama ini, usulan kelompok perempuan selalu ter-*delete* dari bawah misalnya di lingkup keluarga dan desa atau kecamatan.

b. Akses dalam menyentuh persoalan pendidikan untuk perempuan dalam mengejar ketertinggalan akibat anggapan wajar di lingkungan yang patriarki dapat dengan mudah tersampaikan.

c. Akses dalam menyentuh persoalan kesehatan yang selama ini sering dianggap sebagai aib yang tidak memperkenankan orang lain mengetahuinya selain dirinya sendiri.

d. Akses dalam menyentuh persoalan ekonomi sebagai upaya dalam pemandirian ekonomi dalam keluarga.

e. Akses dalam ranah publik baik untuk menyuarakan maupun terlibat secara langsung dalam pengentasan feminisasi kemiskinan yang tengah dialami.

f. Akses dalam meningkatkan kehidupan sosial. Ditunjukkan melalui pembuktian *bargaining position* yang telah diperoleh dari pemberdayaan sekolah perempuan.

g. Akses dalam memperoleh informasi dan manfaat dalam melakukan pengawalan program pembangunan daerah yang sebelumnya telah diusulkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Partisipasi atau *Who does what ?*, keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam memberikan kontribusi berupa keterlibatan di setiap alur penentuan keputusan khususnya pembangunan.

   Dengan adanya musrenbang perempuan, bentuk partisipasi yang dapat dilakukan antara lain :

   a. Di lingkungan keluarga, partisipasi perempuan dalam membentuk sebuah keluarga yang memiliki pemahaman terkait gender dapat dengan mudah dilakukan mengingat kemampuannya dalam bernegosiasi telah diberdayakan sebelumnya.
   b. Di tingkat desa, kelompok perempuan dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa sebagai tim penggerak (*driven*) PUG baik dari segi pemberian edukasi, pemberdayaan ekonomi dan penggalian informasi terkait permasalahan yang ada di desa.
   c. Di ranah publik atau dalam forum musyawarah, partisipasi perempuan selalu dipertimbangkan kehadirannya dalam mengusulkan dan menyukseskan program pembangunan mengingat kapasitasnya dalam merepresentasikan keterlibatan dirinya mengintervensi terlaksananya Pengarusutamaan Gender di daerah. Usulan-usulan yang dibawa dikatakan dapat mewakili kebutuhan perempuan miskin yang selama ini belum terintervensi Pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Partisipasi dalam mengawal perencanaan, pemantauan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan.

Partisipasi perempuan miskin dapat terakomodir melalui terlaksananya musrenbang perempuan. Sebelum diadakannya musrenbang perempuan, keterwakilan perempuan miskin di representasikan oleh KPS2K dan Sekolah Perempuan untuk kemudian mengusulkan inisiasi Musrenbang perempuan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.15

Daftar Hadir Musrenbang Tahun 2017

Kamis, 19 Oktober 2017

NO	Jabatan Pokok / Dinas Instansi		
1.	DPRD	7.	F PKB
2.	PC NU Gresik	8.	F PPP
3.	HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia)	9.	PKK
4.	PD Aisiyah Gresik	10.	Gappensi Gresik (Gabungan Perusahaan Kontruksi)
5.	BPN (Badan Pertahanan Nasional)	11.	KPS2K dan Sekolah Perempuan
6.	Dinas dan Badan Kabupaten Gresik		

Sumber : Hasil observasi peneliti, 29 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kontrol atau *Who has what ?*, penggunaan sumber daya yang dalah hal ini dikhususkan pada proses pembangunan dapat dirasakan oleh lkai-laki maupun perempuan.

   Kontrol perempuan atas program pembangunan melalui musrenbang perempuan lebih efektif karena beberapa alasan berikut :

   a. Di tahap perencanaan, perempuan memiliki kesempatan lebih besar dalam menggali dan menyuarakan usulan yang kemudian dapat diakomodir oleh Pemerintah. Tahap perencanaan ini dimulai dengan menggali permasalahan-permasalahan yang ada di setiap desa melalui metode peta partisipatif. Penggalian informasi ini tidak semudah yang digambarkan. Perempuan-perempuan yang memiliki kapasitas dalam mencari masalah di desa, terlebih dahulu harus memiliki pemahaman yang *sensitive gender* karena bagi perempuan desa yang terbiasa dengan pemahaman patriarki akan menganggap wajar hal tersebut tanpa mempermasalahkannya. Apabila proses penggalian selesai, kemudian dilakukan perundingan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Solusi ini kemudian dibawa ke tahap musyawarah untuk di akomodir sesuai dengan kewenangan dan lingkup masing-masing tingkatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Di tahap pelaksanaan dan pemantauan, perempuan berperan dalam hal memastikan program yang telah diusulkan telah di akomodir oleh Pemerintah. Jika belum, usulan tersebut akan diperjuangkan lagi melalui tahap perencanaan (musrenbang) mendatang. Untuk program yang telah berjalan, kelompok perempuan berperan menjadi penggerak dalam memastikan pelaksanaannya sudah tepat sasaran. Inilah yang disebut dengan program *gender watch* atau audit gender berbasis komunitas dimana kelompok perempuan melakukan pemantauan yang khusus bergerak di bidang perlindungan sosial. Di area Sekolah Perempuan, terdapat pos pegaduan yang berfungsi sebagai mediator atas persoalan perempuan yang terjadi atau atas persoalan pemberian jaminan sosial bagi masyarakat mampu (tidak sesuai sasaran). Anggota sekolah perempuan ini merupakan mitra OPD Kabupaten Gresik dalam menjalankan program pembangunan.

c. Pada tahap evaluasi, perempuan memiliki peran dalam melakukan pelaporan terhadap terlaksananya program pembangunan baik kepada instansi terkait maupun membahasnya dalam proses musyawarah pembangunan berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Manfaat, *Who get what ?*, melalui ketiga proses tersebut artinya memperbesar peluang perolehan manfaat yang seimbang terhadap keadilan gender.

   Manfaat yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan musrenbang perempuan meliputi :

   a. Manfaat pemberdayaan yang diperoleh dari musrenbang perempuan menjadi salah satu media dalam mengoptimalkan posisi perempuan sebagai subyek pembangunan juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dengan adanya musrenbang perempuan, kebutuhan yang selama ini tidak terakomodir dapat menjadi pertimbangan program yang berpeluang besar akan diprioritaskan sebagai rencana pembangunan. Selain itu, musrenbang perempuan juga dapat menjadi tempat edukasi dalam memperdalam pemahaman mengenai gender.

   b. Manfaat akses yang diperoleh dari segi pendidikan, ekonomi, dan kesehatan lebih mudah dijangkau melalui usulan-usulan yang dicantumkan dalam musrenbang perempuan. Meskipun tidak semua usulan langsung diakomodir, namun manfaat yang diperoleh terletak pada orientasi kebijakan yang sebelumnya belum menyentuh penerima manfaat dari kelompok-kelompok marjinal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Manfaat di lingkungan keluarga, masyarakat dan publik dalam memandang perempuan memiliki kapasitas dan integritas yang perlu dipertimbangkan dalam setiap proses pembangunan.

Struktur patriarki yang dominan di sebagian besar masyarakat tidak melibatkan perempuan dalam proses pembuatan keputusan. Hanya peran laki-laki yang dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Pengenalan teknologi baru, program pendidikan, peralatan baru dan jasa yang beraneka ragam, selalu dirundingkan terutama dengan laki-laki. Kapitalisme internasioanl ini (dalam bentuk bantuan dan pembangunan) secara implisit melembagakan dominasi laki-laki atas perempuan karena pengetahuan, bagaimanapun bentuknya dapat memperluas kekuasaan pria.[90]

Dalam pandangan WAD, musrenbang perempuan merupakan salah satu alternatif dalam mempromosikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Menunjukkan pentingnya peran perempuan dalam aspek ekonomi yang selama ini terkurung dalam struktur dan budaya patriarki yang melahirkan ketidakadilan kelas, dapat diperoleh melalui kegiatan Sekolah dan Musrenbang Perempuan. Namun, hal ini akan berjalan cukup lambat apabila tidak ada kesadaran dalam mengkikis budaya patriarki berbasis penafsiran agama. Justru akan menimbulkan beban ganda perempuan di lingkup domestik dan publik. Peran aktor-aktor dengan latar

[90] Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018) hlm 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang agama memiliki potensi dalam mengarusutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Keberlangsungan PUG di Kabupaten Gresik selain didukung oleh Pemerintah Daerah juga masyarakat, peran tokoh agama menjadi salah satu indikator yang memperngaruhi pemahaman terkait gender. Fatwa dari tokoh agama seperti kyai, ustadz, utadzah, pencermah dan sebagainya merupakan salah satu mediator pembelajaran gender yang paling dekat dengan masyarakat. Mengingat Gresik merupakan kota santri atau kota wali maka hal itu berbanding lurus dengan peran tokoh agama yang dianggap memiliki pemahaman ilmu yang tinggi. Sehingga, ketika para tokoh agama masih bias gender dalam penafsirannya, maka model patiarki versi Kabupaten Gresik akan berumur panjang. Jika pemahaman mengenai pekerjaan domestik perempuan dianggap merupakan sebuah perbuatan mulia dalam keidupan berumah tangga, maka kemandirian perempuan secara ekonomi dalam rumah tangga dan organisasinya tidak perlu dilakukan. Selain tokoh agama yang belum mengindahkan posisi perempuan, struktur pemerintahan juga memiliki intervensi dalam melanggengkan budaya patriarki. Struktur pemerintahan yang belum dirasa adil terhadap akses perempuan akan berimplikasi pada terhambatnya upaya mengkampanyekan persamaan gender dalam proses pembangunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dapat dilihat melalui IPG (Indek Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) yang masih terdapat kesenjangan. Selain itu, pemenuhan tujuh prasayarat pelembagaan PUG juga belum maksimal. Hanya 4 diantara 7 yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik antara lain komitmen, kebijakan, kelembagaan dan keterlibatan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Sedangkan 3 prasyarat PUG yang belum terpenuhi antara lain ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDA (Sumber Daya Anggaran), sistem informasi dan data terpilah gender serta analisa terkait PPRG.
2. Kontribusi Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik tahun 2019 dalam mengakomodir pembangunan bagi perempuan dapat dilihat dari terpenuhinya cita-cita dari teori WAD (*Women And Development*) dalam menghubungkan perempuan dan pembangunan khususnya dalam hal ekonomi. Dilihat dari salah satu kluster pembahasan Musrenbang Perempuan yang mengangkat tema pemberdayaan ekonomi dapat dikatakan bahwa perempuan memiliki kesempatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih luas dalam mengatur pendapatannya. Hal tersebut juga memiliki implikasi yang sebanding dengan indikator GAP (*Gender Analysis Pathway*) yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang membuka pintu cukup luas bagi perempuan sebagai penerima manfaat pembangunan.

B. Saran

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah, langkah pembangunan yang mengintegrasikan perspektif gender berawal dari terpenuhinya komitmen Pemerintah Daerah melalui 7 prasyarat pelembagaan PUG. Untuk saat ini, hanya 4 indikator pelembagaan PUG yang telah ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Selain itu, optimalisasi Musrenbang Perempuan tetap dilakukan disamping pemenuhan prasyarat pelembagaan PUG mengingat besarnya manfaat yang dihasilkan dalam pembangunan yang berspektif gender.
2. Persoalan gender di Kabupaten Gresik masih menjadi topik pembicaraan dalam proses pembangunan, upaya PUG yang telah berjalan cukup lama lebih di intensifkan. Refleksi kondisi PUG di Kabupaten Gresik berjalan bersamaan dengan model patriarki penafsiran agama yang dapat mempengaruhi laju perkembangan diskursus PUG dalam pembangunan. Pembinaan dapat dilakukan tidak hanya pada internal pemerintah daerah dan masyarakat miskin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau marjinal, tetapi juga berkenaan dengan organisasi-organisasi keagamaan yang terdapat di Kabupaten Gresik. Organisasi-organisasi tersebut tentu memiliki peran yang cukup intensif dalam mengkampanyekan isu seks dan gender.

3. Pengakderan sekolah perempuan harus tetap dilakukan mengingat kontribusinya dalam mengakomodir kebutuhan perempuan-perempuan miskin yang selama ini belum tersentuh program dan kebijakan pemerintah. Dengan syarat, komitmen yang dimiliki harus sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPS2K dalam mendidik dan memberdayakan perempuan. Sinergi yang terbangun antara Pemerintah dan perangkat daerah harus digalakkan mengingat keterbatasan Sumber daya manusianya yang masih bias gender mengakibatkan efek terkendalanya optimalisasi tujuh prasayarat kelembagaan PUG. Seharusnya, melalui program KPS2K yang telah berjalan komitmen Perangkat daerah dapat dengan mudah dibangun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

https://www.weare.id/perbedaan-fgd-dan-lgd/ (acces : 07/03/2020 15.33 WIB)

Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo

Data hasil musrenbang perempuan diperoleh dari Dinas KBP3A yang masuk dalam Renja 2020

Endasari, Een. 2017. "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Program *Rural Infastructure Support* – PNPM Mandiri Di Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Tahun 2014". *Jurnal Pemerintahan dan Politik* : Vol. 2 No. 1 Agustus

Fahmi, Muhammad. 2016. *Defeminisasi Kemiskinan Berbasis Komunitas di Mondoluku Wringinanom Gresik*. Surabaya : Proceedings Of The International Conference On University-Community Engagement (2-5 Augustus)

Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

gresikkab.go.id/profil/sejarah (acces : 15/02/2020 16.27 WIB)

Hasanah, Ulfatun. 2018. "Gender Dalam Dakwah Untuk Pembangunan : Potret Keterlibatan Perempuan Dalam Politik". *Jurnal Ilmu Dakwah* : Volume 38, No. 2, Juli-Desember

https://gresik.go.id/profil/dinas_kb_pp_dan_perlindungan_anak (acces : 04/03/2020 06.16 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://kps2k.org/lain-lain/musyawarah-rencana-pembangunan-perempuan-musrenbang-perempuan-di-kabupaten-gresik/ (acces : 05/10/2019 18.15 WIB)

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl988/istilah/ (acces 22/02/2020 122.45 WIB)

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan Nasional

Kabupaten Gresik dalam Angka 2017-2018 : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik

Kerjasama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik : *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2017-2019*

Kertati, Indra. "Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Semarang". *Jurnal RIPTEK* Vol. 13 No. I

Kurniasih, Dewi. *Perwujudan Keadilan dan Kesetaraan Gender*

Larasakti, Cahyani Widi. 2017. *Musrenbang Perempuan Sebagai Arena Perjuangan Kesetaraan Perempuan di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat*. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada

Lestari, Windi Budi. *Pemenuhan Kepentingan Gender Melalui Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon, Wringinanom, Kabupaten Gresik*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lestari, Yeni Sri. 2017. *Gender dan Pembangunan Perempuan di Aceh Pasca Konflik dan Tsunami : Pembahasan Teoritis*. *Jurnal Communitty* : Volume 3 No. 1, April

Malau, Waston. "Pengarusutamaan Gender Dalam Program Pembangunan". *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* : Vol. 6 No.2 : 125-131

Materi Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2020 oleh Suti'ah LKPP Jawa Timur (13 Februaru 2020)

Mosse, Julia Cleves. 2007. *Gender & Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Mukhtar, Naqiyah. 2013. "M. Quraish Shihab "Menggugat Bias Gender Para Ulama". *Journal of Quran and Hadith Studies* : Vol. 2, No. 2

Muthmainnah, Laily. "Kritik Feminis Terhadap Developmentalisme". *Jurnal Filsafat* : Vol. 18 No. 3 Desember

Nugroho, Riant. 2011. *Gender dan Strategi Pengarusutamaanya di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Patarai, Muhammad Idris. *Kinerja Keuangan Daerah*

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender

Rahmat, Pupu Saeful. 2009. "Penelitian Kualitatif". *Jurnal Equilibrium* : Vol. 5 No. 9 Januari-Juni

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

Silalahi, Obrelin dan Ratnawati. 2016. "Model Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) Responsif Gender di Kota Banda Aceh". *Jurnal Palastren* : Vol. 9 No. 1 Juni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soetrisno, Loekman.1990. "Peranan Wanita Dalam Pembangunan : Suatu Perspektif Sosiologis". *Jurnal Populasi* : Vol. 1 No. 1

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung : Penerbit Alfabeta

Surat Edaran Tahun 2013 tentang Startegi Nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Swastuti, Endang. "Strategi Pengarusutamaan Gender Sebagai Upaya Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Millenium Di Kabupaten Banjarnegara". *Media Ekonomi dan Manajmen*, Vol.25 No. 1 Januari 2012

Taufi, Muhammad Nur dan Listyani, Refti Handini. 2017. "Pembangunan Berbasis Gender Mainstraming : Studi Analisis Gender Implementasi Program Gender Watch di Gresik". *Jurnal Paradigma* : Vol. 5 No. 3

Tigayanti, Erna, dkk 2014. "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kota Malang : Studi Kasus SMA 8 Malang". *Jurnal Wacana* : Volume 17, No. 4

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Wawancara dengan ketua KPS2K Iva Hasanah

Wawancara dengan *leader* anggota Sekolah Perempuan

Wawancara dengan Soeraningsih selaku Kasub bidang Pelayanan Keluarga Berencana

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yuwono, Dian Maharso. 2013. "Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Pertanian : Kasus Pada Pelaksanaan Program FEATI Di Kabupaten Magelang". *Jurnal SEPA* : Vol. 10 No.1 September

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id